

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI GAMPONG
LAMPOH DAYA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

MUHAMMAD LINTANG

NPM: 2102110003



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Juli 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD LINTANG
NPM : 2102110003

Dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI GAMPONG LAMPOH
DAYA KOTA BANDA ACEH

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

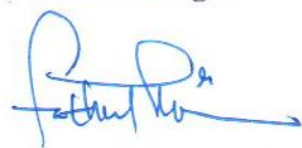
Ketua Program Studi
Akuntansi


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Pembimbing I


Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK: 19790615 200507 1 001

Pembimbing II


Fathul Kahaira, S.E., M.Si
NIK: 19890610 201708 2 001

Mengetahui,
Dekan




Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK: 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Juli 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUHAMMAD LINTANG
NPM : 2102110003

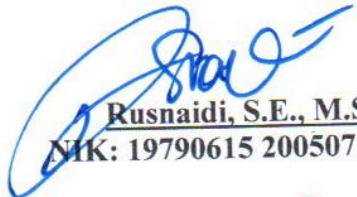
Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI GAMPONG LAMPOH
DAYA KOTA BANDA ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 7 Juli 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

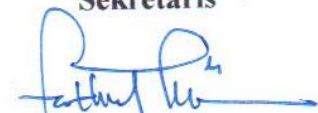
Ketua


Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK: 19790615 200507 1 001

Anggota


Eva Susanti, SE., M.Si, Ak.CA
NIK: 19760202 200607 2 001

Sekretaris


Fathul Kahaira, S.E., M.Si
NIK: 19890610 201708 2 001

Anggota


Irmawati, S.E., M.Si, Ak
NIK: 19750211 200406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK: 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 18 Juli 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Lintang

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Lintang**
NPM : 2102110003
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI GAMPONG LAMPOH DAYA KOTA BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Juli 2025



Banda Aceh, 18 Juli 2025
Yang Menyatakan,

Muhammad Lintang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Di Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan. Kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rusnaldi, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si, Ak, C.A, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Budi Safatul Anam, S.E., M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Elviza, S.E., M.Si, selaku Ketua Labotarium akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Rusnaldi, S.E, M.Si, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
Fathul khaira, S.E, M.S, selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, pikiran, dan juga semangat untuk membuat skripsi ini serta masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen, staf pengantar dan karyawan universitas Muhammadiyah Aceh

7. Ayah, Ibu dan Adek tercinta, Achmad Rizal, S.E., M.Si, Mainar, A.Md., Citra Rizma Ramadani. Tiga, orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung dengan segala pilihan dan keputusan yang telah diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini, Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.

.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 9 Mei 2025
Penulis,

(MUHAMMAD LINTANG)

DAFTAR ISI

KATA PENANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Pengelolaan	11
2.1.2 Teori Pengelolaan Keuangan.....	14
2.1.3 Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa	15
2.2 SDM Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.2.1 SDM Dalam Konteks Desa	18
2.2.2 SDM Pengelola Keuangan Desa	21
2.3 Peran Masyarakat	26
2.3.1 Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	26
2.4 Penelitian Sebelumnya	29
2.5 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.1.1 Tujuan Penelitian.....	35
3.1.2 Jenis Penelitian	35
3.1.3 Horizon Waktu	36
3.1.4 Unit Analisis	37
3.2 Populasi Dan Sampel.....	37
3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.2 Sumber Daya Aparatur	47
4.3 Hasil Penelitian dan Analisis.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengelolaan Keuangan Gampong Lampoh Daya	7
Tabel 1.2 Pengelolaan Keuangan Gampong Lampoh Daya	8
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	31
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel	38
Tabel 4.1 Sumber Daya Aparatur Gampong Lampoh Daya	47
Tabel 4.2 Implikasi Pengelolaan Keuangan Gampong	49
Tabel 4.2.1 Implikasi Pengelolaan Keuangan Gampong	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	40
Gambar 4.1 Bagian Susunan Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	86
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	88

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI GAMPONG LAMPOH DAYA KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD LINTANG
NPM: 2102110003

Pembimbing : 1) Rusnaldi, SE., M.Si
2) Fathul Kahaira., SE, M.S

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya, Kota Banda Aceh, dengan fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan aparatur desa dan masyarakat sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya masih menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai sistem pencatatan keuangan belum dioptimalkan, menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, peningkatan transparansi dengan menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Gampong, Transparansi, Akuntabilitas, Peran Masyarakat

**ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN GAMPONG LAMPOH
DAYA BANDA ACEH CITY**

**MUHAMMAD LINTANG
NPM: 2102110003**

Pembimbing : 1) Rusnaldi, SE., M.Si
2) Fathul Kahaira., SE, M.S

ABSTRACT

This research aims to analyze financial management in Gampong Lampoh Daya, Banda Aceh City, with a focus on the planning, implementation, recording, reporting, and monitoring processes. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving village officials and the community as the main informants. The results showed that financial management in Gampong Lampoh Daya still faces several obstacles, including limited capacity of human resources (HR), lack of transparency, and low community participation in supervision. In addition, the use of the Siskeudes application as a financial recording system has not been optimized, causing errors in recording and reporting. Based on these findings, this study recommends increasing human resource capacity through periodic training, increasing transparency by providing financial information openly to the community, and encouraging community participation in the supervision process to ensure more effective and accountable village financial management.

Key Word : *Gampong Financial Management, Transparency, Accountability, Community Role.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gampong merupakan bagian dari konstitusional Negara Republik Indonesia. Membangun Gampong berarti membangun sebagian penduduk Indonesia. Hal ini sangat mudah dimengerti karena lebih dari delapan 80% (delapan puluh per seratus) masyarakat Indonesia tinggal di gampong. Pengelolaan keuangan gampong (desa) merupakan elemen penting dalam keberhasilan pembangunan gampong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan infrastruktur pada gampong tersebut.

Sebagai salah satu desa di Provinsi Aceh, Gampong Lampoh Daya memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat melalui dana desa, serta Pendapatan Asli Gampong (PAG). Kebijakan tersebut tertulis dalam beberapa undang undang pemerintahan dengan desentralisasi melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. UU ini juga mengatur mengenai beberapa pengaturan, kependudukan, jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa.

Pada akhir tahun anggaran, laporan tentang pelaksanaan APBD disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat, badan permusyawaratan gampong (desa), dan masyarakat dalam musyawarah desa, paling lambat satu bulam sebelum tahun berakhir, laporan realisasi harus dikirim. Sanksi atas keterlambatan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBD menyebabkan atau

dikirim tepat waktu, itu akan memiliki konsekuensi bahwa dana transfer tidak diberikan. Oleh karena itu, jika laporan pertanggungjawaban tidak selesai tidak akan dialokasikan dengan tepat, yang akan mempengaruhi kinerja operasi desa pada tahun anggaran selanjutnya. Laporan yang tidak dikirim tepat waktu dapat menunjukkan masalah administrasi atau hambatan dalam mengelola keuangan gampong. Akibatnya, desa harus bekerja lebih keras untuk memenuhi tanggung jawab dan tetap terlibat dalam siklus pengelolaan keuangan tersebut (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Pengawasan keuangan di tingkat desa dan gampong sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Di banyak tempat, gampong merupakan unit terkecil yang memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya dan juga pelayanan publik. Karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan di gampong guna memahami bagaimana sumber daya dikelola dan dialokasikan untuk kebaikan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak gampong yang menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam pengelolaan keuangan. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi beberapa faktor yang menghambat perbaikan pengelolaan keuangan. Selain itu, isu-isu seperti penyalahgunaan dana, ketidaktransparanan, dan kurangnya akuntabilitas sering kali mengemuka, yang berdampak negatif pada pembangunan gampong. (Mutia Basri et al., 2020).

Perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan semua aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan sebagai pengelola keuangan Sunaryadi et al., (2021). Oleh karena itu, pengelolaan mencakup semua aspek suatu organisasi, seperti administrasi, personal, ketatausahaan, dan peralatan dan prasarana. Administrasi menjadi sangat penting untuk kegiatan pelaksanaan. Ketidak beraturan administrasi pada tahap pelaksanaan menyebabkan kegiatan penataan usaha yang buruk. Akibatnya menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan desa akan menjadi sulit bagi pejabat desa yang berwenang.

Salah satu cara untuk memastikan orang yang bertanggung jawab atas pengolahan keuangan desa adalah dengan mengikuti aturan administrasi. Praktik pengolahan keuangan desa yang tidak teratur dapat menjadi salah satu sumber korupsi kepala dan staf desa. Selain itu, sistem pemerintah untuk mengelola keuangan juga tidak berfungsi, sebagai konsekuensi gampong gagal melaksanakan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Dengan kata lain, akuntabilitas desa dalam pengelolaan keuangan ditunjukkan oleh kinerja administrasi yang baik dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan (Abidin, 2015).

Jika desa memenuhi hak masyarakat untuk mengakses informasi, desa dianggap memenuhi prinsip transparansi. Ini kerana ketertiban administrasi yang mencakup laporan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan APDB desa dan prosedur administrasi untuk setiap kegiatan terkait pengolahan keuangan, dapat memudahkan masyarakat untuk menapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Pengelolaan keuangan gampong menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun, Gampong Lampoh Daya menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penggunaan dana yang belum optimal. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas program pembangunan yang direncanakan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat gampong.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas SDM. Pengelolaan keuangan desa memerlukan pemahaman yang baik tentang akuntansi, manajemen keuangan, dan regulasi seperti penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Sayangnya, banyak aparat desa di Gampong Lampoh Daya tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai di bidang ini. Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan dan laporan keuangan secara akurat. Kekurangan ini menyebabkan kesalahan administratif, keterlambatan pelaporan, atau bahkan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, yang pada akhirnya menghambat alokasi dana dan pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan besar. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. Namun, rendahnya keterlibatan masyarakat di Gampong Lampoh Daya, baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, maupun pengawasan, sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari aparat desa terkait program yang direncanakan. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan anggaran desa memperburuk situasi ini. Akibatnya, masyarakat kurang memperhatikan penggunaan dana, yang dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan dana atau pelaksanaan proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan lain adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan yang baik, tetapi di beberapa desa, termasuk Gampong Lampoh Daya, informasi tentang penggunaan anggaran desa tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini terlihat dari tidak adanya laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, serta minimnya forum pertemuan untuk mengevaluasi anggaran secara terbuka. Ketidaktransparanan ini menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat desa, bahkan memicu spekulasi tentang potensi penyalahgunaan dana, terlepas dari kenyataan yang terjadi.

Penyalahgunaan dana menjadi isu serius yang perlu perhatian lebih. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan, dan minimnya partisipasi masyarakat menciptakan peluang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan dana desa. Penyalahgunaan ini bisa berupa penggelapan dana, manipulasi dokumen keuangan, hingga pelaksanaan proyek fiktif. Dampaknya sangat merugikan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau layanan sosial tidak sampai ke sasaran.

Kombinasi dari tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Gampong Lampoh Daya. Upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat menjadi langkah utama untuk memastikan dana desa digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang baik memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sistem pengelolaan yang terencana, gampong dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti jalan, dan fasilitas umum lainnya, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan yang efektif juga membuka peluang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberian akses modal. Dalam bidang sosial, pengelolaan keuangan yang transparan memungkinkan gampong menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih jauh lagi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, menciptakan hubungan harmonis dan kolaboratif dalam mewujudkan tujuan pembangunan bersama.

Proses pengelolaan keuangan yang terencana dan transparan ini dapat dijabarkan ke dalam tahapan-tahapan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pengelolaan Keuangan Gampong Lampoh Daya Tahun 2024

Tahapan	Kegiatan utama	Anggaran	Realisasi	Persentase	Surplus
Perencanaan	Musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah gampong (RKPG)	9.012.000,00	8.250.000,00	91%	762.000,00
Penganggaran	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG)	7.974.000,00	7.900.000,00	99,07%	74.000,00
Pelaksanaan	Pencatatan semua transaksi keuangan gampong	1.544.072.096	722.346.055	46,78%	821.726.041
Pelaporan	Penyusunan laporan pertanggung jawaban	7.974.000,00	7.900.000,00	99,07%	74.000,00
Jumlah		1.569.032.096,00	746.396.055,00	47,57%	822.636.041,00

Sumber: Siskeudes (2024)

Sebagai pembandingan terhadap data pengelolaan keuangan sebelumnya, pada tahun 2023 Gampong Lampoh Daya juga mencatat rincian anggaran, realisasi, dan surplus yang menunjukkan tren peningkatan pengelolaan yang lebih terstruktur. Hal ini terlihat pada Tabel 1.2, yang memuat rincian lebih lengkap berdasarkan tahapan pengelolaan:

Tabel 1.2
Pengelolaan Keuangan Gampong Lampoh Daya Tahun 2023

Tahapan	Kegiatan utama	Anggaran	Realisasi	Persentase	Surplus
Perencanaan	Musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah gampong (RKPG)	525.500,00	469.009,00	89,27%	56.491,00
Penganggaran	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG)	13.006.000,00	12.481.179,00	95,96%	524.821,00
Pelaksanaan	Pencatatan semua transaksi keuangan gampong	1.712.644.696	1.510.873.844	88,19%	201.770.852,00
Pelaporan	Penyusunan laporan pertanggung jawaban	13.006.000,00	12.481.179,00	95,96%	524.821,00
Jumlah		1.739.182.196,00	1.548.305.211,00	92,35%	202.876.985,00

Sumber: Siskeudes (2024)

Tahapan-tahapan tersebut memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Dengan menjalankan setiap tahap secara efektif, gampong dapat memastikan alokasi dana yang tepat, pelaksanaan program yang optimal, dan evaluasi yang akurat, sehingga mendukung keberhasilan program pembangunan yang berkelanjutan. Dari definisi diatas yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengelolaan keuangan digampong, pengelolaan keuangan digampong merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan gampong menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program. Sebagai contoh gampong lampoh daya menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan. Kendalanya seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penggunaan dana yang belum optimal sering menjadi hambatan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat gampong dan menghambat efektivitas program pembangunan yang direncanakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan di gampong lampoh daya kota banda aceh, menemukan masalah yang dihadapi dan memberikan saran untuk perbaikan. Dengan memahami praktik pengelolaan keuangan saat ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu membangun sistem pengelolaan yang lebih baik, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat digampong. Peneliti menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya untuk menentukan aspek apa yang membedakan penelitian sebelumnya. Dalam penelusuran ini, terdapat beberapa penelitian yang sebanding dari segi disiplin ilmu yang digunakan oleh peneliti saat ini dan beberapa penelitian yang memiliki tema yang mirip.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Keuangan di Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan pada Gampong Lampoh Daya Dikota Banda Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Digampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya serta faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam mendorong dalam pengawasan anggaran guna menciptakan system keuangan yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berperan dalam mengembangkan teori mengenai pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya pada penulis dalam bidang akuntansi sector publik dan manajemen keuangan desa, khususnya

dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan transparansi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran aparatur desa dalam pengelolaan keuangan serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi anggaran desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian dimasa mendatang.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah rangkaian proses sistematis yang mencakup perencanaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas keuangan suatu organisasi atau entitas. Proses pengolahan ini melibatkan beberapa tahapan dan konsep dasar yang menghasilkan informasi akurat, relevan, tepat waktu bagi para pemangku kepentingan. aktivitas yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan organisasi guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada demi mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Harefa et al., (2022), Menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan, yang dilakukan untuk mengelola penggunaan sumber daya keuangan dengan cara yang efektif, efisien, transparasi, dan akuntabel, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sektor publik, tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah memastikan dana yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mengikuti peraturan yang ada.

Ada empat komponen pengelolaan keuangan menurut (Harefa et al., 2022)

1. Perencanaan keuangan

Proses ini mencakup penyusunan anggaran terstruktur, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), yang mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran. Tujuan dari penyusunan rencana ini adalah untuk mengidentifikasi prioritas dalam penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga

anggaran dapat dialokasikan dengan tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pelaksanaan keuangan

Pelaksanaan keuangan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, dengan memprioritaskan prinsip efisien, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan pengeluaran yang minimal. Efektivitas memastikan bahwa dana yang digunakan benar benar mendukung pencapaian yang sudah ditetapkan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan agar setiap anggaran yang diterima digunakan secara tepat sasaran, memberikan hasil yang maksimal, serta mengutamakan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

3. Pelaporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan hasil dari realisasi anggaran dan sisa dana yang tersedia. Laporan ini mencakup informasi utama seperti neraca, laporan oprasional, dan laporan arus kas, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan organisasi. Neraca mencerminkan posisi keuangan pada waktu tertentu, laporan oprasional menyajikan hasil kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran, sedangkan laporan arus kas menggambarkan pergerakan uang masuk dan keluar. Secara keseluruhan, laporan keuangan ini tidak hanya memberikan informasi yang tepat tentang kinerja keuangan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penyajian yang jelas membantu pemangku kepentingan untuk memahami dengan baik keadaan keuangan organisasi dan mengambil keputusan yang tepat.

4. Pengawasan dan pengendalian keuangan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang ditetapkan. Hal ini melibatkan audit oleh Lembaga independen, seperti badan pemeriksa keuangan (BPK) atau inspektorat daerah, yang bertugas menilai dan memverifikasi bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pengawasan keuangan berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan dan tetap memenuhi standar akuntabilitas serta kepatuhan hukum. Dengan adanya lembaga audit yang tidak terafiliasi dengan organisasi yang diaudit, hasil pengawasan akan lebih objektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pihak terkait.

Selanjutnya menurut Garrison et al., (2017), Pengelolaan keuangan akuntansi diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengelola asset serta kewajiban perusahaan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala. Tujuan utama pengelolaan ini adalah memberikan gambaran keuangan yang jelas kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, manajer, dan investor, agar mereka dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut.

Pengelolaan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, baik pada skala kecil maupun besar. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer atau pemimpin dalam mengelola sumber daya secara efektif dan membimbing anggota organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat mencapai efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam jangka Panjang.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan berarti proses, cara, atau tindakan dalam mengelola sesuatu, yaitu mengatur, mengurus, atau mengawasi berbagai aspek untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, pengelolaan merujuk pada proses pengaturan atau pengelolaan sesuatu atau sumber daya, seperti sumber daya alam, organisasi, keuangan, atau waktu, guna memastikan bahwa hal tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, pengelolaan mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Büyük et al., (2023) seorang pakar manajemen dari Prancis, pengelolaan adalah fungsi umum yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fayol menekankan bahwa pengelolaan tidak hanya terbatas pada dunia bisnis atau organisasi tertentu, tetapi juga dapat diterapkan diberbagai jenis organisasi lainnya. Ia menyatakan bahwa pengelolaan adalah fungsi penting yang harus dijalankan oleh setiap manajer untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Stoner & Greenwood, (1982) dalam bukunya *management* (1982), pengolahan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manusia serta sumber daya lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Stoner juga menekankan bahwa pengolahan merupakan proses pemecah masalah yang berkesinambungan dan mencakup pengambilan keputusan yang rasional.

2.1.2 Teori Pengelolaan Keuangan

Teori pengelolaan keuangan berkaitan dengan konsep dan prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangan dalam berbagai entitas, termasuk pemerintah, organisasi, atau perusahaan. Proses pengelolaan keuangan ini mencakup tahapan yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana yang ada. Teori-teori yang mendasari pengelolaan keuangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut empat teori penting dalam pengelolaan keuangan Menurut (Makaminang et al., 2022)

1. Teori penganggaran

Penganggaran bertujuan untuk merencanakan distribusi sumber daya dengan cara mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. pengelolaan keuangan mencakup proses perencanaan anggaran yang menjamin bahwa dana dialokasikan sesuai dengan tujuan dan batas yang telah ditentukan. Dalam sektor publik, Widiarti, (2018) menyatakan bahwa pengelolaan anggaran harus berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka Panjang.

2. Teori efisiensi dan efektivitas

Pengelolaan keuangan juga mengedepankan prinsip efisiensi (menggunakan sumber daya dengan biaya yang minimal) dan efektivitas (mencapai tujuan yang telah ditetapkan). Menurut Hendriksen & Van Breda, (1992) dalam teori akuntansi, efektivitas diukur dengan seberapa banyak tujuan organisasi yang tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sedangkan efisiensi berfokus pada seberapa sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Teori akuntabilitas dan transparansi

Pengelolaan keuangan yang efektif harus mengutamakan prinsip akuntabilitas (tanggung jawab) dan transparansi (keterbukaan). Teori ini menyatakan bahwa setiap aktivitas keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan dan informasi keuangan harus disajikan secara terbuka agar dapat dipahami dan diaudit. Mardiasmo, (2018) menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

4. Teori pengawasan keuangan

Menurut, Sari et al., (2023) pengawasan dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak disalah gunakan. Proses pengawasan ini dilakukan melalui audit oleh Lembaga independent, seperti badan pemeriksa keuangan (BPK), yang bertugas memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2.1.3 Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang memiliki nilai finansial, termasuk berbagai bentuk kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang undang ini menjadi pijakan utama dalam pengelolaan keuangan desa, dengan Undang-undang pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur berbagai aspek terkait:

1. Sumber pendapatan desa
 - a. Pendapatan asli desa (PAG), yang mencakup hasil usaha, pemanfaatan asset desa, serta pendapatan sah lainnya.
 - b. Dana desa yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
 - c. Alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota.
 - d. Hibah serta sumbangan lain yang bersifat tidak mengikat.
2. Prinsip pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
3. Tahapan pengelolaan
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dilakukan sebagai dari tahap perencanaan
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) disusun berdasarkan rencana kerja tersebut
 - c. Kegiatan yang telah direncanakan APBDes kemudian dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, merupakan pedoman teknis untuk melaksanakan undang undang desa. Kedua peraturan ini mengatur prosedur penyelenggaraan pemerintahan desa,

termasuk pengelolaan keuangan, pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat desa.

Pelaksanaan peraturan pemerintah PP Nomor 47 Tahun 2015 terkait pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa langkah dan prinsip yang harus diikuti oleh pemerintah desa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan musyawarah desa (Mudes) yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menetapkan prioritas program pembangunan desa. Dari musyawarah ini, dihasilkan rencana kerja pemerintah desa (RKPD) yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). RKPD memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran, dengan memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional.

2. Penganggaran

Setelah RKPD disusun, langkah selanjutnya adalah penyusunan APBD yang memuat rincian tentang pendapatan dan belanja desa, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. APBD ini mencakup alokasi dana yang berasal dari berbagai sumber pendapatan desa, seperti dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, serta sumbangan dan hibah

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan APBD dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan program yang telah direncanakan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Pada tahap ini, perangkat desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penatausahaan

Semua dokumen keuangan desa, termasuk bukti transaksi dan laporan keuangan, harus dikelola dengan teliti dan tepat oleh bendahara desa. Penatausahaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses keuangan desa, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran

5. Pelaporan dan pertanggung jawaban

Kepala desa diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode anggaran tersebut. Laporan ini harus disampaikan kepada bupati/Walikota serta masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah nomor PP No 47 Tahun 2015 tentang desa yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang efisien, transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan setiap tahap melibatkan kolaborasi antara masyarakat, perangkat desa, dan pengawasan dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan menerapkan prinsip pengelolaan yang baik, diharapkan dana desa dapat mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.2 SDM Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.1 SDM Dalam Konteks Desa

SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur mengacu pada kemampuan individu dalam organisasi pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja ini meliputi berbagai aspek, seperti efektivitas, efisiensi, produktifitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Kinerja SDM aparatur menunjukkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dengan baik, memenuhi standar kualitas, serta memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Kinerja yang optimal ditandai oleh pencapaian target kerja, pemenuhan indikator kinerja yang ditentukan, serta

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mengatasi berbagai tantangan yang akan muncul. (Nurjaya et al., 2021)

Kinerja SDM aparatur memiliki peran yang krusial dalam pelaksanaan pemerintahan dan pemberian layanan publik. Kinerja yang baik pada aparatur dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk meningkatkan kinerja aparatur, berbagai langkah strategis dapat dilakukan, seperti meningkatkan kompetensi melalui program latihan dan Pendidikan, mendorong motivasi dengan kepemimpinan yang efektif, memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian kerja, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, serta melibatkan aparatur secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. (Eryana, 2018)

Selain itu, pemerintah atau lembaga terkait perlu secara rutin melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur. Langkah ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas publik. Secara keseluruhan, kinerja sdm aparatur merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan Lembaga atau organisasi pemerintahan, sekaligus memastikan tersedianya layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat desa.

Pengembangan SDM aparatur desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Ada 4 tujuan yang dapat diidentifikasi antara lain menurut (Zainal, 2021)

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik: peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kompetensi yang memadai, aparatur desa mampu memberikan pelayanan yang lebih optional, responsif, dan selaras dengan kebutuhan warga.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas pemerintah: pengembangan sumber daya manusia aparatur desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan pengembangan ini, aparatur desa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, memahami prosedur yang berlaku, serta mampu mengelola sumber daya secara optimal.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: pengembangan sumber daya manusia aparatur desa diharapkan dapat mendorong aparatur desa untuk lebih proaktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal ini memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk berkontribusi dalam keputusan dan pembangunan yang menyangkut kepentingan mereka.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: peningkatan kualitas sdm aparatur desa turut mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan kompetensi yang memadai, aparatur desa cenderung melaksanakan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab, serta terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi yang objektif.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan perhatian serta dukungan yang memadai dalam pengembangan SDM aparatur desa. Keterlibatan aktif masyarakat desa dan pemberian motivasi yang sesuai juga menjadi faktor kunci. Di samping itu penting untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta membangun budaya organisasi yang mendukung pengembangan sdm aparatur desa berdasarkan kemampuan dan kinerja.

2.2.2 SDM Pengelola Keuangan Desa

Sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada kemampuan dan keterampilan individu yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki pelatihan dan keahlian yang memadai memainkan peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kompetensi SDM yang baik akan memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Berikut adalah beberapa potensi temuan yang dapat diidentifikasi berdasarkan pengalaman, pandangan, dan hambatan yang umum dihadapi oleh pengelolaan keuangan desa:

1. Pengalaman pengelola keuangan desa

Pengalaman yang dimaksud mencakup berbagai hal yang telah dialami oleh pengelolaan keuangan dalam menjalankan tugas mereka, baik yang menunjukkan hasil positif maupun yang menunjukkan area yang perlu perbaikan. Pengalaman ini bisa dikelompokkan kedalam beberapa kategori tertentu:

a. Penyusunan anggaran

Pengelolaan keuangan desa sering terlibat dalam proses perencanaan anggaran tahunan. Pengalaman mereka dalam menyusun anggaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisa berbeda beda. Beberapa pengelola mungkin memiliki pengalaman yang baik karena telah mengikuti

pelatihan dan memahami peraturan yang berlaku. Namun, ada juga yang menghadapi kesulitan dalam merancang anggaran yang akurat, terutama dalam menentukan prioritas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)

Beberapa pengelolaan keuangan desa mungkin merasa terbantu dengan adanya aplikasi siskeudes, yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Namun, bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi atau kurang mendapatkan pelatihan, penggunaan aplikasi ini bisa menjadi tantangan. Pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi ini juga bisa mencakup kesulitan dalam mengatasi masalah teknis atau hambatan lainnya yang muncul selama proses penggunaannya.

c. Penggunaan keuangan

Pengalaman dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan hal yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang sudah terbiasa dengan prosedur pelaporan mungkin merasa lebih lancar dalam mengelola dokumen dan laporan keuangan. Sebaliknya, mereka yang kurang pengalaman atau pelatihan bisa menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa data yang dilaporkan sudah lengkap dan akurat.

2. Persepsi pengelola keuangan desa

Persepsi pengelola keuangan desa mengenai pengelolaan keuangan desa dapat mencerminkan sejauh mana mereka memahami tugas dan tanggung jawab

yang mereka jalankan. Beberapa aspek yang bisa diungkapkan melalui wawancara adalah:

a. Pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan

Sebagian besar pengelolaan keuangan desa kemungkinan memiliki pandangan positif terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Mereka menyadari bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, ada juga beberapa menganggapnya sebagai beban administrative yang memerlukan waktu dan usaha ekstra.

b. Persepsi tentang regulasi dan kebijakan

Persepsi pengelolaan keuangan terhadap regulasi yang ada bisa sangat bervariasi. Beberapa merasa bahwa regulasi dan pedoman yang ada sudah cukup jelas dan memudahkan mereka dalam menjalankan tugas, sementara yang lain merasa kebingungan akibat banyaknya aturan atau perubahan kebijakan yang sering terjadi yang membuat mereka kesulitan untuk mengikuti dan memahami dengan tepat.

c. Persepsi terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas

Jika ada pelatihan atau workshop yang diselenggarakan untuk pengelolaan keuangan desa, mereka akan memiliki pandangan mengenai efektivitas pelatihan tersebut. Beberapa pengelola mungkin merasa lebih percaya diri setelah mengikuti pelatihan, sementara yang lain bisa merasa bahwa pelatihan tersebut belum cukup atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengelola keuangan desa.

3. Tantangan yang dihadapi pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa dapat menghadapi tantangan yang bersumber dari faktor internal desa maupun dari faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Beberapa hambatan yang mungkin muncul meliputi hal hal berikut:

a. keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan SDM yang terampil dalam pengelolaan keuangan desa sering menjadi kendala utama. Banyak pengelola keuangan desa memiliki latar belakang Pendidikan yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi atau manajemen keuangan, sehingga menghadapi kesulitan dalam memahami aturan dan prosedur yang berlaku.

b. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan keuangan

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk oprasional pengelolaan keuangan desa menjadi masalah. Dalam beberapa kasus, pengelolaan keuangan desa merasa tidak memiliki cukup dana untuk membeli perangkat lunak yang memandai, mengikuti pelatihan, atau melakukan audit secara rutin.

c. Kurangnya pengawasan dan dukungan dari pihak terkait

Pengelolaan keuangan desa kerap menghadapi kendala terkait pengawasan dan bantuan dari pihak pihak terkait, seperti pemerintahan kecamatan atau dinas yang berwenang. Tanpa pengawasan yang memandai atau pendampingan yang cukup, mereka dapat merasa kebingungan atau mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dengan baik.

d. perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi

Perubahan kebijakan dan regulasi yang terjadi secara berkala, baik di tingkat nasional maupun daerah, sering membingungkan pengelolaan keuangan desa, terutama jika mereka tidak memperoleh informasi yang memadai. Dalam beberapa kasus, mereka harus menyesuaikan laporan atau prosedur sesuai dengan aturan terbaru, yang tentunya membutuhkan waktu dan usaha tambahan.

e. Partisipasi masyarakat yang minim

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, seperti pada tahap penyusunan anggaran atau pengawasan pemanfaatan dana, merupakan tantangan tersendiri. Ketika masyarakat kurang aktif atau kurang memahami pengelolaan keuangan desa, perhatian terhadap penggunaan dana desa menjadi rendah, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat akuntabilitas.

f. Masalah integritas dan penyelewengan

Walaupun pengelolaan keuangan desa berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka tetap menghadapi tantangan besar terkait integritas dan resiko penyalahgunaan dana. Pengelolaan sering kali bekerja dibawah tekanan untuk mengelola anggaran yang terbatas, yang dapat memunculkan godaan atau kesulitan dalam memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi.

Pengelolaan keuangan desa sering menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan

kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, maupun dari faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah yang tidak selalu disertai dengan pelatihan yang tidak memadai. Gampong lampoh daya, sebuah desa di kota banda aceh, adalah contoh yang menggambarkan tantangan tersebut. Agar pengelolaan keuangan desa di gampong lampoh daya dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan sesuai dengan peraturan, mereka perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai.

Menurut Suwarno et al., (2023), SDM dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada kemampuan dan kualifikasi aparat desa dalam mengelola dana desa dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. SDM yang memiliki keahlian dalam akuntansi dan manajemen keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa sesuai standar yang berlaku, sehingga memperbaiki akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Pemahaman yang baik mengenai sistem akuntansi desa serta peraturan yang mengatur juga menjadi faktor krusial untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan dan memastikan pengelolaan dana yang efisien.

2.3 Peran Masyarakat

2.3.1 Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan

Peran masyarakat adalah faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan dan pengembangan di desa. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Peran masyarakat tidak hanya mencakup partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan, tetapi juga

mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di desa. Tanpa peran aktif masyarakat, setiap kegiatan pembangunan berpotensi gagal. Hal yang sama berlaku untuk pengelolaan dana desa, dimana peran masyarakat sangat penting agar dana dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Gampong lampoh daya, kecamatan jaya baru, Kota Banda Aceh, pengelolaan dana desa masih terbatas dalam hal keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi ini berdampak pada rendahnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang menggunakan dana desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya peran masyarakat antara lain adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait program dana desa, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai program tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa.

Peran masyarakat di setiap bagian desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang paling krusial adalah partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat, karena mereka adalah pemegang kedaulatan negara ini. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan program pengelolaan dana desa dan pembangunan ditingkat desa. Untuk itu, diperlukan analisis mendalam mengenai cara pengelolaan dana desa, serta faktor yang mempengaruhinya. Dengan pemahaman ini, diharapkan program pengelolaan dana desa dapat berjalan berkelanjutan dan efektif. (Mentari Tumbel, 2017)

Peran atau keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dalam setiap program, tetapi juga mencakup partisipasi mereka dalam mengidentifikasi masalah serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Tanpa keterlibatan masyarakat, pengelolaan dana desa dan berbagai kegiatan pembangunan tidak akan mencapai keberhasilan. Apapun bentuk partisipasi yang diberikan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan individu, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu faktor internal dan eksternal, seperti yang dijelaskan oleh (Mentari Tumbel, 2017):

1. Faktor internal

Faktor ini mencakup karakteristik individu yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik tersebut meliputi usia, tingkat Pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, dan pengalaman dalam kelompok. Aspek ini menentukan kemampuan dan motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan yang ditawarkan.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal melibatkan hubungan yang terbentuk antara pengelola proyek dan kelompok sasaran. Partisipasi akan meningkat jika pengelola proyek memberikan sambutan yang positif, menciptakan hubungan yang menguntungkan bagi masyarakat, dan menyediakan layanan yang sesuai

dengan kebutuhan mereka. Ketika masyarakat merasa mendapatkan manfaat dan pelayanan yang memandai, mereka cenderung lebih antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Faktor faktor tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keadaan individu, tetapi juga oleh lingkungan dan pendekatan yang diterapkan oleh pihak pengelola kegiatan.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Menurut Permata intan nur, fauzan ahmad, (2023), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Masaran Banyuates Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam” Penelitian ini mengkaji pengelolaan dana desa dalam perspektif islam dan mengungkapkan bahwa pendekatan yang menekankan prinsip keadilan dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum secara mendalam membahas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini akan melengkapi aspek tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam.

Menurut Mahyudin et al., (2022), melakukan penelitian dengan judul “Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” Penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi SDM pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa masih memerlukan peningkatan. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya keterampilan teknis, minimnya pelatihan, dan terbatasnya dukungan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan pelatihan berkelanjutan serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi

pengelolaan. Penelitian ini sangat relevan untuk memahami peran SDM dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini akan melengkapi aspek tersebut menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam.

Menurut Hasan et al., (2020), melakukan penelitian dengan judul “Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat” Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi resiko penyalahgunaan dana. Namun partisipasi masyarakat masih terhambat oleh kurangnya pemahaman dan akses terhadap informasi keuangan desa. Penelitian ini akan melengkapi aspek tersebut dengan melalui wawancara mendalam.

Menurut Asoka, (2018), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa” Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa telah mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala seperti minimnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan keuangan. Faktor yang mendukung pengelolaan ini mencakup regulasi yang jelas dan peran pendamping desa, sementara hambatan utama terletak pada perencanaan yang kurang optimal. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Penelitian ini akan melengkapi aspek tersebut dengan melakukan survei dan wawancara secara mendalam.

Menurut Mentari Tumbel, (2017) Melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tarenan Kabupaten Minahasa Selatan” Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih terbatas. Partisipasi masyarakat cenderung rendah pada tahap perencanaan dan pengawasan, sedangkan pada tahap pelaksanaan lebih dominan berupa kontribusi dalam bentuk tenaga kerja. Kurangnya sosialisasi dan minimnya transparansi menjadi kendala utama. Penelitian ini sangat relevan karena menekankan pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini akan melengkapi aspek tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian, Nama penelitian, dan tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisi pengelolaan dana desa masaran banyuates terhadap kesejahteraan ekonomi dalam perspektif islam (permata intan nur, fauzan ahmad, 2023)	Kualitatif	Memperbaiki infrastruktur, ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun menghadapi kendala pada sdm dan partisipasi masyarakat	Menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dan menggali pemahaman yang lebih mendalam	Dalam penelitian ini Fenomena yang diambil menggunakan wawancara mendalam
2	Sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Mahyudin et al., 2022)	Kualitatif	Menyoroti bahwa kualitas sdm pemerintah desa berdampak pada pengelolaan dana desa, pelatihan dan pendamping berperan penting untuk meningkatkan efektifitas	Berfokus pada pengelolaan dana desa, menyoroti pentingnya kualitas sdm pemerintah desa, serta pelatihan untuk memperbaiki efektifitas dan keterbukaan	Dalam penelitian ini Fenomena yang diambil menggunakan wawancara mendalam

No	Judul Penelitian, Nama penelitian, dan tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Prospektif model pengelolaan keuangan desa melalui pengawasan berbasis masyarakat (Hasan et al., 2020)	Kualitatif	Menyimpulkan bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa	Menggunakan pendekatan kualitatif, pada pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan akuntabilitas.	Dalam penelitian ini Fenomena yang diambil menggunakan wawancara mendalam
4	Analisis pengelolaan keuangan dana desa (Asoka, 2018)	Kualitatif	Pengelolaan dana desa memerlukan bimbingan, pelatihan sumber daya manusia, dan pengawasan untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi	Menekankan pengelolaan dana desa, serta peran sdm dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas	Dalam penelitian ini Fenomena yang diambil menggunakan wawancara mendalam
5	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa tumaluntung satu kecamatan tareran kabupaten minahasa selatan (Mentari Tumbel, 2017)	Kualitatif	Menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terbatas, namun dapat ditingkatkan melalui pendidikan, sosialisasi	Menggunakan pendekatan kualitatif, meliputi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa	Dalam penelitian ini Fenomena yang diambil menggunakan wawancara mendalam

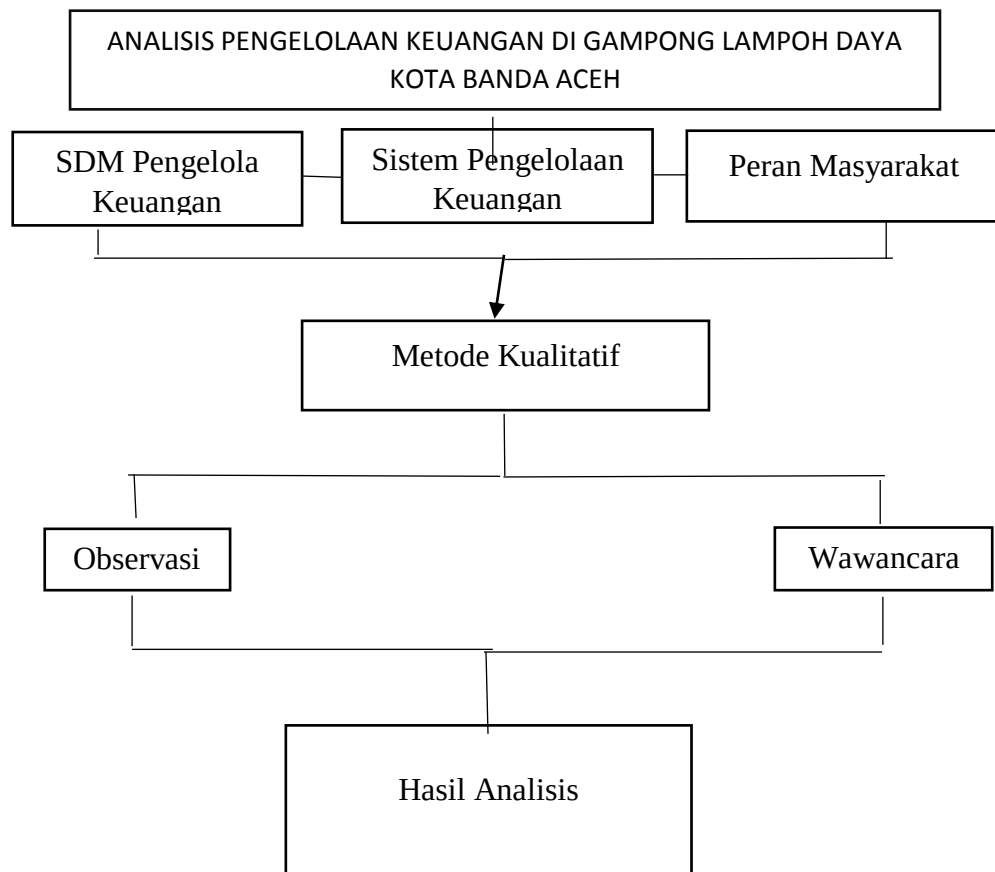
Sumber: Abstrak Penelitian dari permata intan nur, fauzan ahmad, 2023, Mentari Tumbel, 2017, Hasan et al., 2020, Mahyudin et al., 2022, Asoka, 2018.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa merupakan elemen kunci dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Gampong Lampoh Daya, pengelola keuangan yang baik menjadi pondasi untuk meningkatkan insfrasuktur desa dan menyediakan layanan publik secara optimal. Proses pengelolaan

keuangan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, yang harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Aparatur desa memiliki peran penting sebagai pengelola utama, bertanggung jawab memastikan anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan dana desa yang efektif, berbagai infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, serta fasilitas umum lainnya dapat dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran tidak hanya membantu meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat akuntabilitas aparatur desa. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah desa, kebutuhan dan aspirasi lokal dapat diakomodasi dalam program pembangunan yang dirancang. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Dengan kerja sama antara pengelolaan keuangan yang baik oleh aparatur desa dan partisipasi aktif masyarakat, Gampong Lampoh Daya diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala pembangunan serta mencapai kemajuan yang berkelanjutan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dirancang untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data langsung dari lingkungan alami. Penelitian ini berfokus pada menggali makna, pengalaman, dan pandangan partisipan dalam konteks tertentu. Desainnya bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan situasi, dimana peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan analisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena, dengan penekanan pada relevansi hasil untuk diterapkan pada konteks serupa, bukan untuk generalisasi luas.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis sistem pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya, Kota Banda Aceh, dengan mendeskripsikan tantangan dan peluang yang dihadapi, serta memahami bentuk evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan tersebut.

3.1.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Balakrishnan & Forsyth, (2019), Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, yaitu data yang memiliki makna. Makna tersebut merupakan inti dari data, yaitu nilai yang terkandung dibalik data yang terlihat. Oleh sebab itu,

penelitian kualitatif tidak berfokus pada generalisasi, melainkan pada pemahaman makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut *transferability*, yang berarti hasil penelitian dapat diterapkan di lokasi lain asalkan lokasi tersebut memiliki karakteristik yang serupa.

Menurut Charismana et al., (2022), penelitian kualitatif memiliki tingkat kedalaman yang tinggi karena data dikumpulkan langsung dari lapangan, dengan partisipan yang terlibat langsung dalam konteks sosial objek penelitian. Karakteristik penelitian ini meliputi pengumpulan data secara langsung, penggunaan data untuk mengembangkan konsep dan teori, teknik sampling yang mencakup representasi subjek secara acak, pemahaman terhadap pemikiran, sikap dan perilaku individu, keterbukaan terhadap penjelasan alternatif, serta penekanan terhadap pendapat, pengalaman dan perasaan individu. Pendekatan ini berakar pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang memahami dan mengalami fenomena sosial, informasi yang jelas, serta analisis yang mendalam.

3.1.3 Horizon Waktu

Dengan menggunakan horizon waktu cross sectional, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan, seperti kurangnya transparansi dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga dirancang untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di gampong, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa tahun 2024 yang berfokus pada periode satu tahun tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya perbaikan yang berkesinambungan di masa mendatang. (Rachman, 2018)

3.1.4 Unit Analisi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perorangan, meliputi sekretaris desa (Sekdes), bendahara, kaur perencanaan, serta warga Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh. Pemilihan unit ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan keuangan desa dan pemahaman yang dimiliki terkait proses tersebut. Data yang dianalisis diperoleh melalui wawancara mendalam, yang menggali pengalaman, pemikiran, dan persepsi individu terhadap praktik pengelolaan keuangan gampong.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup penduduk Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh, yang berjumlah 2.133 jiwa menurut data tahun 2024. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai pendekatan untuk menetapkan batas maksimum jumlah responden yang dapat mewakili populasi secara proposional. Adapun rumus slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan

N = Jumlah Populasi

E = Margin Of Error (Tingkat kesalahan yang ditoleransi)

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 96 orang.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, rumus slovin digunakan sebagai panduan untuk menentukan jumlah maksimal informan agar data yang diperoleh tetap mewakili populasi secara merata. Setelah jumlah maksimum ditentukan, informan dipilih secara bertahap dan hati hati. Proses ini dilakukan

hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup atau mencapai titik jenuh, yaitu ketika data yang dikumpulkan tidak lagi memberikan informasi baru atau berbeda. Hal ini penting agar hasil penelitian benar mencerminkan kondisi dilapangan. Informasi mengenai jumlah sampel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengujian Pada Populasi Dan Sampel

Populasi	Sampel
2.133	96

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Arviyanda et al., (2023) menjelaskan data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi atau wawancara yang telah disusun sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian harus berkaitan dengan seluruh atau sebagian variable yang diteliti.

Data primer mencakup informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama atau responden melalui berbagai cara, seperti wawancara langsung atau tidak langsung, observasi, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), maupun penyebaran kusioner. Data ini diperoleh langsung oleh peneliti untuk memastikan keaslian dan relavansi informasi yang diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber pertama melalui proses pengumpulan langsung.

2. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, yaitu data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Beberapa contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan keuangan, serta data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah (Rukhmana, 2021).

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai dasar penelitian, metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

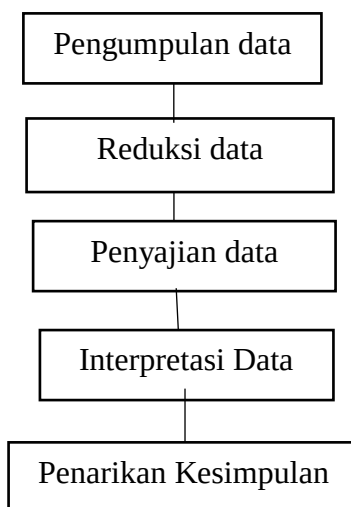
1. Observasi: Merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan langsung dilapangan untuk melihat peristiwa atau kejadian yang terjadi. Dengan cara ini, penulis dapat memperkuat dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan.
2. Wawancara: Merupakan interaksi verbal untuk tujuan tertentu dalam memperoleh informasi. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk menggali informasi. Wawancara bias dilakukan dengan pendekatan terstruktur atau tidak terstruktur, serta dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau daring. Namun, akan lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan.

3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti mengambil teknik Analisis Tematik, teknik ini mencakup proses identifikasi tema utama yang muncul dari data wawancara dan observasi. Peneliti memeriksa transkrip wawancara dan catatan observasi untuk mengidentifikasi pola atau tema yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan digampong lampoh daya kota banda aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data dari Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktifitas pengumpulan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai saturasi data. Proses analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data: dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dicatat dalam bentuk teks
2. Reduksi data, adalah proses memilah, memusatkan perhatian, menyederhanakan, merangkum, serta mengelompokkan data mentah dari hasil temuan dilampangan ke dalam beberapa unit
3. penyajian data, dilakukan dengan menggambarkan data yang telah dikelompokkan sesuai dengan topik pembahasan yang disajikan dalam bentuk narasi.
4. Interpretasi data, menghubungkan data dengan teori atau analisis
5. penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam proses analisis data



Gambar 3.1
Teknik Analisis Data

Sumber:(Diyati & Muhyadi, 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh

Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh merupakan salah satu desa di Kota Banda Aceh yang memiliki keragaman penduduk serta potensi ekonomi yang mampu menunjang pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan desa ini mengikuti ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat guna menjamin penggunaan anggaran yang efisiensi dan tepat sasaran.

Struktur pemerintahan desa dipimpin oleh keuchik dan di dukung oleh perangkat desa seperti seketaris gampong, bendahara, dan kaur perencanaan. Mereka bersama sama mengelola berbagai sumber dana seperti dana desa, alokasi dana desa (AAD), dan pendapatan asli gampong (PAG) untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan, karena memastikan anggaran disusun dan dijalankan sesuai kebutuhan dan prioritas lokal.

4.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

4.1.1.1 Tugas

1. Pengelolaan keuangan gampong

Dalam pengelolaan keuangan di gampong, kantor keuchik memegang peran utama dalam mengatur dan mengatur dan mengawasi pemakaian dana desa. Keuchik perlu menyusun rencana kerja tahunan bersama masyarakat, lalu

membuat anggaran berdasarkan rencana tersebut. Setelah dana diterima, keuchik bertanggung jawab memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan. Keuchik juga wajib menyusun laporan keuangan secara transparan dan menyampaikan kepada masyarakat serta pihak pemerintah agar penggunaan dana desa bisa diketahui dan diawasi bersama.

2. SDM Pengelolaan Keuangan

Sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam pengelolaan keuangan gampong meliputi perangkat gampong, seperti sekretaris gampong yang berperan dalam penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan, bendahara yang mengatur kas serta transaksi keuangan, dan kaur keuangan yang menangani pelaksanaan teknis administrasi keuangan. Kualitas SDM ini sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, pelatihan, pendamping teknis, dan pendamping teknis, dan pengawasan secara rutin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami aturan, menyusun laporan yang baik, dan menjalankan sistem keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawaban.

3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting karena warga dapat berpartisipasi dalam rapat musyawarah untuk menyampaikan pendapat dan menentukan program yang dibutuhkan oleh desa. Selama pelaksanaan kegiatan, masyarakat juga dapat turut serta membantu jalannya kegiatan tersebut. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan apabila terdapat hal yang tidak sesuai. Dengan

keterlibatan aktif ini, masyarakat turut memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan benar bermanfaat untuk kepentingan bersama.

4.1.1.2. Fungsi

1. Fungsi kantor keuchik

- a. Perencanaan: Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan desa bersama masyarakat
- b. Pelaksanaan: Melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana dan anggaran yang telah disetujui bersama
- c. Pengawas: Memantau pelaksanaan kegiatan dan pemakaian dana agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Pelapor: Membuat laporan terkait keuangan dan pelaksanaan kegiatan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat serta pihak pemerintah

2. Fungsi SDM Pengelola Keuangan (Perangkat Gampong)

- a. Seketaris Gampong: Membuat dokumen perencanaan kerja serta menyusun berbagai laporan administrasi
- b. Bendahara Gampong: Mengelola arus kas dan mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang terjadi
- c. Kaur Keuangan: Mempersiapkan dokumen anggaran, mencatat bukti pembayaran, serta menjaga keteraturan administrasi keuangan.

3. Fungsi Masyarakat

- a. Perencanaan: Menyampaikan pendapat dan turut menetapkan program melalui forum musyawarah desa
- b. Pelaksanaan: Turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan desa seperti pembangunan jalan, posyandu, dan berbagai program lainnya

- c. Pengawas: Memantau pemanfaatan dana serta memberikan masukan atau kritik agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara tepat dan merata

4.1.1.3. Struktur organisasi

Dengan diterbitkan peraturan gubernur mengenai struktur, tugas, fungsi, dan cara pemerintahan gampong. Hal ini semakin memperjelas dan mempertegas peran serta fungsi pemerintahan gampong dalam sistem pemerintahan yang lebih mandiri. Secara umum, struktur organisasi gampong terdiri dari: 1) Keuchik (Pimpinan Gampong), 2) Sekretariat Gampong, 3) Kasi Pemerintah, 4) Kasi Pelayanan, 5) Kasi Kesejahteraan, 6) Kaur Keuangan, 7) Kaur Umum dan Perencanaan.



Gambar 4.1

Bagian Struktur organisasi

Struktur Organisasi Kantor Keuchik terdiri dari

1. Unsur Pimpinan yaitu Keuchik:

- a. Keuchik merupakan tokoh utama dalam kepemimpinan ditingkat gampong. Ia memikul tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan social masyarakat, serta mendorong pemberdayaan warga. Jabatan ini diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat setempat.

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Gampong berperan dalam mendukung tugas Keuchik, khususnya dalam hal administrasi dan pengelolaan tata usaha pemerintahan gampong. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, keuangan, serta penyusunan berbagai laporan yang dibutuhkan.

3. Unsur pelaksana terdiri dari:

- a. Kaur keuangan: Bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan gampong, yang mencakup penyusunan anggaran serta pembuatan laporan keuangan secara berkala.
- b. Kaur umum dan pelaksanaan: Memiliki tugas dalam merancang program kegiatan serta mengukur administrasi umum guna mendukung kelancaran oprasional pemerintahan gampong
- c. Kasi pemerintah: Bertugas mengurus dokumen kependudukan serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah ditingkat gampong

- d. Kasi kesejahteraan: Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat digampong
- e. Kasi pelayanan: Menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat, mencakup layanan dasar serta pengelolaan administrasi yang dibutuhkan warga.

4.2 Sumber Daya Aparatur

Aparatur gampong merupakan personel yang bertugas menjalankan peran pemerintahan ditingkat desa. Berikut adalah gambaran sumber daya aparatur Gampong Lampoh Daya Tahun 2024:

Tabel 4.1
Sumber Daya Aparatur Gampong Lampoh Daya Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir	Masa jabatan
1	M. Wahyudi CMC	Keuchik	S1	2024-2030
2	Ir. Catur Wibowo	Sekretaris	S1	2024-2030
3	Amalia putri	Kaur Umum dan perencanaan	Sma	2024-2030
4	Mahendra	Kaur keuangan	Sma	2024-2030
5	Firdaus, S.H	Kasi kesejahteraan	S1	2024-2030
6	Ramadana, S.Sos	Kasi pelayanan	S1	2024-2030
7	Hasril	Kasi pemerintah	Sma	2024-2030
8	TGK. Nyak Gam Rahmat	Kepala dusun I	Sma	2024-2030
9	Muzakir Nyak Cut	Kepala dusun II	Sma	2024-2030

10	Abdullah	Kepala dusun III	Sma	2024-2030
11	Syahril	Kepala dusun IV	Sma	2024-2030

4.2.1 Analisis Kapasitas SDM Aparatur

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas aparatur gampong memiliki jenjang terakhir pada tingkat sma. Hanya sebagian kecil, terutama pada posisi strategis seperti keuchik, sekretaris, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, yang memiliki latar belakang Pendidikan tinggi seperti S1. Selain itu, sebagian besar aparatur masih berstatus honorer dan belum diangkat secara definitif, yang berpotensi memengaruhi kestabilan dan konsistensi kinerja organisasi.

- a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek pengetahuan, administrasi, dan pengelolaan keuangan.
- b. Minimnya kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala terhadap aparatur
- c. Ketergantungan terhadap aparatur berstatus honorer menyebabkan kurangnya kesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat

4.2.2 implikasi terhadap pengelolaan keuangan gampong

Evektifitas pengelolaan keuangan gampong dipengaruhi secara langsung oleh kompetensi aparatur desa dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan. Untuk memperjelas, tabel dibawah ini memaparkan perbandingan antara alokasi

dana dan realisasi penggunaan pada tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

Tabel 4.2
Implikasi Pengelolaan Keuangan Gampong

Tahapan	Kegiatan utama	Anggaran	Realisasi	Persentase	Surplus
Perencanaan	Musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah gampong (RKPG)	9.012.000,00	8.250.000,00	91%	762.000,00
Penganggaran	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG)	7.974.000,00	7.900.000,00	99,07%	74.000,00
Pelaksanaan	Pencatatan semua transaksi keuangan gampong	1.544.072.096	722.346.055	46,78%	821.726.041
Pelaporan	Penyusunan laporan pertanggung jawaban	7.974.000,00	7.900.000,00	99,07%	74.000,00
Jumlah		1.569.032.096,00	746.396.055,00	47,57%	822.636.041,00

Sumber: Sikeudes (2024)

Data dan implikasi pengelolaan keuangan gampong yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9.012.000, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 8.250.000, sehingga terdapat sisa dana sekitar Rp 762.000. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPG) berjalan cukup baik dan

mendekati rencana awal, dengan adanya efisiensi anggaran yang menunjukkan pengelolaan yang cukup efektif.

2. Penganggaran

Pada tahap penganggaran, dari total anggaran sebesar Rp 7.974.000, telah direalisasikan sebesar Rp 7.900.000, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 74.000. selisih yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBG) telah dilaksanakan dengan sangat baik dan hampir sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan

Pada tahap penatausahaan, dari total dana yang tersedia sebesar Rp1.544.072.096, baru terealisasi sebesar Rp722.346.055. Dengan demikian terdapat sisa dana sebesar Rp821.726.041 yang belum tercatat atau belum digunakan. Selisi yang cukup besar ini menunjukan adanya permasalahan dalam proses pencatatan transaksi keuangan gampong. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan administrasi keuangan, adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi, atau belum optimalnya pemanfaatan sistem aplikasi keuangan desa seperti siskeudes.

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan, dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7.974.000, realisasi penggunaan dana mencapai Rp7.900.000, dengan selisih yang hanya sebesar 74.000. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan pertanggung jawaban telah dilaksanakan dengan sangat baik dan hampir sepenuhnya sesuai dengan rencana.

Untuk melihat pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun, berikut ini disajikan perbandingan data realisasi anggaran tahun 2023 yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan gampong pada tahun sebelumnya. Data ini menjadi dasar untuk menganalisis pencapaian serta kendala yang dihadapi pada masing-masing tahapan pengelolaan keuangan.

Tabel 4.2.1
Implikasi Pengelolaan Keuangan Gampong

Tahapan	Kegiatan utama	Anggaran	Realisasi	Persentase	Surplus
Perencanaan	Musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah gampong (RKPG)	525.500,00	469.009,00	89,27%	56.491,00
Penganggaran	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG)	13.006.000,00	12.481.179,00	95,96%	524.821,00
Pelaksanaan	Pencatatan semua transaksi keuangan gampong	1.712.644.696	1.510.873.844	88,19%	201.770.852,00
Pelaporan	Penyusunan laporan pertanggung jawaban	13.006.000,00	12.481.179,00	95,96%	524.821,00
Jumlah		1.739.182.196,00	1.548.305.211,00	92,35%	202.876.985,00

Sumber: Sikeudes (2024)

Berdasarkan data dalam Tabel 4.2.1, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Gampong Lampoh Daya tahun 2023 sudah menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat realisasi mencapai 92,35%. Namun demikian, masih

terdapat surplus yang cukup besar, khususnya pada tahap pelaksanaan, yang mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum seluruhnya terserap. Temuan ini memperkuat analisis bahwa perlu adanya peningkatan efektivitas dalam penggunaan dana pada tahap implementasi agar program pembangunan desa dapat berjalan secara optimal.

4.3 Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori serta metodologi penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang telah dipilih secara cermat. Pemilihan informan menjadi aspek penting dalam penelitian untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi :

1) Aparatur Gampong, 2) Masyarakat Gampong.

Analisis mengenai pengelolaan keuangan gampong ini disusun berdasarkan ketentuan terbaru, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam analisis ini dibahas dalam tiga pokok bahasan, yaitu: 1) Pengelola Keuangan Gampong, 2) SDM Pengelola Keuangan, 3) Peran masyarakat. Hasil penelitian ini nantinya akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku saat ini serta dengan konsep yang relevan mengenai pengelolaan keuangan gampong. Melalui perbandingan tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai bagaimana kondisi ideal maupun kondisi nyata dari pengelola keuangan

gampong, SDM Pengelola Keuangan, Peran Masyarakat di Gampong Lampoh Daya, Kota Banda Aceh.

4.3.1 SDM Pengelola Keuangan

1. Apa faktor utama yang memicu terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan gampong? Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak wahyudi selaku keuchik gampong lampoh daya kota banda aceh sebagai berikut:

“Kalau soal aturan keuangan desa, memang sering ada perubahan setiap tahunnya. Tapi jujur saja, digampong kami kadang ga selalu dapat sosialisasi atau pelatihan tentang aturan aturan yang baru. Jadi banyak diantara kami yang masi pakai cara lama seperti yang dulu diajarkan. Misalnya dalam buat laporan atau penggunaan dana, format dan caranya masih pakai yang lama, padahal sekarang kami khawatir, nanti malah salah kiarena nggak ikut perkembangan terbaru”

Selanjutnya dari Alm Hasril (Kasi Pemerintah) berpendapat yaitu:

“soal pelatihan, kami di gampong emang jarang dapat kesempatan. Padahal sekarang semua pelaporan keuangan harus lewat aplikasi siskeudes. Banyak dari kami yang belum benar benar paham cara pakainya. Beberapa emang perna ikut pelatihan, tapi itu sudah lama dan gasemua aparatur bisa ikut. Jadi npas harus input data, banyak yang masih bingung bahkan ada yang salah masukan. Kalua aplikasinya ada pembaruan kami juga sering gatau. Makanya kami merasa perlu ada pelatihan rutin supaya lebih paham cara kerja aplikasi dan bisa nyusun laporan dengan benar sesuai laporan yang berlaku”

Terkait pengelolaan keuangan bapak Firdaus selaku kasih kesejahteraan juga memberi pendapat dokumentasi yang tidak rapi dan terstruktur yaitu:

“Selama ini, masalah yang sering kami hadapi itu soal penyimpanan dokumen keuangan. Kadang bukti transaksi kayak nota atau kwintansi itu nggak langsung disimpan ditempat khusus. Ada yang numpuk dimeja, ada juga yang nyeli8b ntah kemana. Jadi pas waktu bikin laporan, kami kelambatan nyari dokumen pendukungnya. Kadang juga karena nggak diberi keterangan lengkap, kita sendiri lupa itu buat kegiatan apa. Harusnya ada sistem penyimpanan yang rapih, misalnya, dipisah perkegiatan , tapi belum sampai kesitu. Jadi ya sering kali laporan jadi lambat atau malah revisi dokumen nggak lengkap atau susah dicari”

Selanjutnya Kasi Pelayanan bapak Ramadana juga berpendapat yaitu:

“Sampai saat ini, belum ada sistem pengarsipan dokumen keuangan yang tertera dengan baik digampong kami. Bukti transaksi seperti nota dan kwintansi sering kali hanya disimpan seadanya dan tercampur dengan dokumen lain. Saat penyusunan laporan kami kesulitan menemukan bukti pengeluaran, ada yang hilang, rusak, atau tidak jelas kegiatannya. Akibatnya laporan terlamba dan harus direvisi”

Kemudian Bapak Catur Wibowo (seketaris desa) juga memberi pendapat mengenai pengelolaan keuangan yang menghambat antara lain yaitu:

“Perencanaan anggaran kadang dibuat terburu buru, jadi belum sepenuhnya sesuai kebutuhan desa. Ada kegiatan yang dananya kurang atau justru anggaran dialokasikan tapi kegiatannya tidak jadi. Musyawarah juga kurang efektif karna partisipasi masyarakat rendah. Akibatnya, banyak pelaksanaan yan harus diubah dan laporan keuangan jadi tidak sesuai dengan rencana awal”

Kaur Keuangan Bapak Mahendra juga menambahkan pendapatnya perencanaan anggaran yaitu:

“Dalam penyusunan anggaran, masih sering digunakan dari tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kondisi atau kebutuhan terkini, termasuk perubahan harga. Selain itu, beberapa program diajukan sekedar untuk mengisi anggaran, meskipun belum tentu benar benar dilaksanakan. Hal ini menyebabkan banyak penyesuaian saat pelaksanaan. Agar lebih tepat sasaran seharusnya pelaksanaan dilakukan berdasarkan data yang valid dan melalui proses musyawarah partisipatif sejak awal”

Pada Kaur Umum dan Perencanaan Ibu Amalia putri berpendapat yang menjadi salah satu faktor yang menghambat pengelolaan keuangan ialah sebagai berikut:

“Karena banyak di antara kami tidak berasal dari bidang keuangan, kami cukup kesulitan saat pertama kali menangani anggaran desa. Beberapa istilah dalam laporan seperti kode rekening, dan jenis belanja masih terasa asing. Kurangnya pemahaman ini membuat kami sering keliru saat menginput atau menyusun laporan. Kami berharap ada pelatihan yang lebih sederhana dan sesuai dengan kemampuan dasar yang kami miliki”

Selanjutnya Bapak Tgk. Nyak Gam selaku ulee Jurong 1 berpendapat yaitu;

“Pencairan dana desa sering tidak tepat waktu. Seharusnya dana sudah masuk di awal tahun, tetapi kenyataannya kerap mengalami keterlambatan. Bahkan, dana baru cair ketika kegiatan hampir mau dimulai, sehingga pelaksanaannya terpaksa dilakukan dengan tergesa gesa agar anggaran tetap terserap. Akibatnya banyak terjadi kesalahan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyusunan laporan. Jika dana cair sesuai jadwal, tentu perencanaan dan pelaporan bisa dilakukan lebih tertip dan terorganisir”

Bapak muzakir selaku ulee Jurong II menambahkan pendapat mengenai pencairan dana yang telat yaitu:

“Dana Desa sering kali cair terlambat, padahal kegiatan sudah direncanakan sejak awal. Karena pencairan enggak tepat waktu, pelaksanaan program pun ikut tertunda. Saat dana akhirnya masuk, waktunya sudah mepet sehingga semua kegiatan harus dilakukan dengan cepat. Banyak hal yang kurang maksimal baik dalam pelaksanaan maupun pencatatan keuangan”

Ulee Jurong III Bapak Abdullah berpendapat yang menjadi salah satu penghambat pengelolaan keuangan ialah sebagai berikut:

“Dalam hal perencanaan dan pengawasan keuangan, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Saat musyawarah desa, yang hadir biasanya hanya orang-orang tertentu, bahkan lebih didominasi oleh perangkat desa. Banyak warga yang merasa tidak perlu ikut karena menganggap itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah desa. Padahal, jika masyarakat terlibat sejak awal dengan memberikan masukan, hasilnya biasa lebih sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Begitu juga dalam pengawasan, sangat jarang warga yang aktif menanyakan atau mengawasi penggunaan dana. Akibatnya, pengelolaan keuangan berjalan tanpa pengawasan langsung dari masyarakat. Jika keterlibatan warga lebih tinggi, pengelolaan pasti akan lebih terbuka dan saling mengontrol”

Sementara itu Bapak Syahril selaku ulee Jurong IV, juga menyampaikan hal yang selaras yaitu:

“Sebenarnya masyarakat sudah diberikan ruang untuk terlibat dalam musyawarah, tapi sebagian besar tidak hadir. Mungkin karena mereka belum memahami pentingnya peran mereka atau merasa pendapatnya kurang berpengaruh. Akibatnya, keputusan lebih banyak ditentukan oleh pihak desa. Padahal, kalau masyarakat mau aktif memberikan masukan dan ikut

mengawasi, program yang dijalankan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan mereka”

2. Bagaimana keterkaitan antara pelatihan aparatur desa dengan peningkatan efektifitas dalam pengelolaan keuangan? Dalam hal ini sekretaris desa Bapak Catur Wibowo menyampaikan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

“Dengan adanya pelatihan, kami jadi lebih paham bagaimana menyusun laporan keuangan dengan benar. Sebelumnya kami sering mengisi data seadanya karena takut salah, dan biasanya menunggu koreksi dari atasan terlebih dahulu. Namun, setelah mengikuti pelatihan, kami bisa menyusun laporan sendiri dengan lebih percaya diri sejak awal”

Kemudian Bapak Mahendra juga memberikan pendapatnya mengenai pelatihan aparatur desa sebagai berikut:

“Pelatihan rutin sangat ngebantu apalagi buat kami yang ga punya latar belakang keuangan. Setiap ada aturan atau format baru, biasanya langsung dijelaskan dipelatihan. Jadi kami nggak ketinggalan info. Karena sudah dijelaskan langkah langkahnya, kami jadi lebih ngerti pas nyusun laporan. Sekarang juga lebih jarang salah, soalnya sudah tau mana boleh dan nggak boleh. Dulu sering bolak balik revisi dn sekarang sudah mulai rapi”

Kemudian Ibu Amelia Putri selaku kaur umum dan perencanaan menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

“Saat mengikuti pelatihan, kami tidak hanya belajar cara membuat laporan keuangan tapi juga diberikan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dari situ kami mulai mengerti bahwa laporan keuangan harus dibuat secara jujur, terbuka, dan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat”

3. Bagaimana kualitas SDM mempengaruhi pengelolaan keuangan gampong?

Bapak Syarbini berpendapat mengenai kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan antara lain yaitu:

“Jika SDM di gampong memahami keuangan dengan baik, mereka bisa mengelola dana dengan lebih efektif. Contohnya, mereka tahu cara menyusun laporan keuangan yang tepat, sehingga penggunaan dana menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi. Hal ini membuat pengelolaan dana menjadi lebih tertata dan aman, karena setiap pengeluaran tercatat dengan jelas dan dapat dipantau dengan baik”

Selanjutnya Bapak Muslim memberi pendapat mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

“Kalau SDM nya berkualitas, mereka bisa memastikan semua penggunaan dana desa tercatat dengan jelas dan terbuka. Dengan akuntabilitas yang baik, masyarakat jadi lebih mudah mengawasi penggunaan dana tersebut. Jadi, gaada yang harus ditutup tutupi, semuanya transparan. Ini sangat penting karena dengan cara ini, potensi penyalahgunaan dana bisa diminimalisir dan pengelolaannya jauh lebih terjamin.

Bapak Syamsul Bahri menambahkan yaitu:

“Kalau perangkat desanya udah berpengalaman, biasanya mereka lebih siap waktu ada pemeriksaan. Soalnya mereka udah paham apa aja yang perlu disiapin, jadi nggak kaget atau bingung lagi”

Selaku warga setempat yaitu Bapak Marzuki Yahya berpendapat mengenai administrasi yang menghambat pengelolaan keuangan gampong yaitu:

“kalau perangkatnya paham tugasnya, biasanya kerjanya juga lebih tertata. Pengelolaan dana desa jadi jelas, nggak semauanya. Warga pun ngerasa lebih tenang karena semuanya terbuka”

Bapak Luran (Warga setempat) berpendapat yaitu:

“Iya, kalau yang ngerjain nggak ngerti administrasi, ya laporan keuangannya suka kacau. Ada aja yang keliru, entah salah masukin data atau ada yang kurang. Ujung-ujungnya harus diperbaiki terus.”

Bapak Ramadana selaku kasi pelayanan yang menjadi salah satu penghambat SDM Pengelolaan Keuangan pengalaman bekerja yaitu:

“Iya, biasanya kalau perangkatnya udah lama kerja tuh udah ngerti ritmenya. Jadi begitu ada kabar mau diperiksa, mereka langsung siapin dokumennya. Pas dicek tinggal kasih aja, nggak perlu repot nyari-nyari lagi”

Kasi Kesejahteraan Bapak Firdaus menambahkan:

“kalau perangkat desanya ngerti bener apa yang jadi tugasnya, biasanya kerjanya juga lebih hati-hati dan tanggung jawab. Pengelolaan dana desa jadi lebih tertib, nggak asal-asalan”

4.3.2 Sistem Pengelola Keuangan

1. Apa konsekuensi social dari kurangnya transparasi informasi keuangan desa kepada masyarakat? dalam hal ini Bapak Syarbini menyampaikan bahwa kurangnya transparansi sebagai berikut:

“Transparansi itu kunci, soalnya kalau nggak ada, warga jadi nggak tahu apa-apa. Mereka cuma bisa lihat dari jauh, nggak bisa ikut andil atau ngasih masukan”

Bapak Muslim menambahkan pendapatnya yaitu:

“Transparansi itu sangat penting. Kalau nggak ada, warga cuma jadi penonton, nggak bisa ikut bantu atau ngontrol”

Selanjutnya Bapak Syamsul Bahri selaku warga gampong menyampaikan:

“Kalau nggak dibuka ke masyarakat, ya wajar lah kita mikir yang nggak-nggak, Mas. Soalnya dana desa ke mana dipakai juga kita nggak dikasih tahu”

Bapak Marzuki Yahya juga menambahkan yaitu:

“Lama-lama warga enggan ikut rapat atau kegiatan, soalnya ngerasa nggak dilibatkan dalam urusan desa”

Ajiran Ramdan selaku warga menyampaikan dalam wawancara yaitu:

“Sekarang, kalau ada rapat atau acara desa, yang hadir itu-itu aja, Mas. Warga pada nggak datang karena merasa suara mereka nggak diperhatiin, jadi ya malas ikut”

Bapak Mahfud selaku warga menyampaikan pendapatnya yaitu:

“Ajak warga gotong royong sekarang makin susah, Mas. Soalnya banyak yang merasa nggak transparan, anggaran dipakai buat apa aja juga nggak pernah dijelaskan ke warga”

Ghufran sedikit menambahkan mengenai gotong royong yaitu:

“Iya, sekarang gotong royong makin susah digerakin. Warga jadi mikir dua kali mau bantu, soalnya mereka lihat dana desa aja nggak jelas ke mana arahnya”

Bapak Luran menambahkan mengenai transparansi keuangan gampong yaitu:

“Kalau semuanya terbuka kan enak, semua warga tahu dan ikut terlibat. Kalau gini, kita cuma jadi penonton aja”

Bapak yunus lutfi menambahkan pendapatnya yaitu:

“Kalau semuanya terbuka dan jelas, enak. Semua bisa tahu dan ikut serta. Tapi sekarang, kita cuma bisa nonton aja, kayak nggak dilibatkan”

Bapak Sugeng Riyadi menyampaikan kurangnya transparansi dalam social gampong yaitu:

“Warga jadi pada ragu, siapa yang terima bantuan, siapa yang nggak. Soalnya nggak ada info yang dipajang di tempat umum.

Bapak Mahdi Yunus menyampaikan pendapatnya yaitu:

“Kekeluargaan di desa jadi nggak sekuat dulu, karena sekarang warga pada saling curiga. Banyak yang ngerasa diperlakukan nggak adil, jadi muncul ketegangan di antara mereka”

Selanjutnya Bapak Ibrahim juga menambahkan pendapatnya yaitu:

“Rasa kekeluargaan di desa jadi hilang. Warga mulai saling curiga, terutama kalau ada yang nggak jelas atau nggak terbuka”

2. Bagaimana pengaruh kurangnya akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat? Bapak Muclis menyampaikan pendapatnya yaitu:

“Kalau nggak ada kejelasan soal uang desa, ya gimana kami mau percaya. Soalnya takutnya disalahgunain”

Selanjutnya Bapak Imran Usman menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Masyarakat jadi mikir negatif. Kayak dana desa diselewengin, padahal belum tentu juga, tapi karena nggak transparan ya curiga”

Bapak Muhammad berpendapat kurangnya kepercayaan masyarakat sebagai berikut:

“Kita jadi males ikut musyawarah, karena ujung-ujungnya kita nggak tahu uangnya ke mana. Padahal musyawarah itu penting buat nentuin arah pembangunan desa, tapi kalau hasilnya nggak jelas dan nggak ada laporan, ya warga jadi apatis.”

Selanjutnya Bapak Rahmad juga memberikan pendapatnya mengenai rasa kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan yaitu:

“Percaya itu muncul kalau pengelolaan keuangan terbuka, kalau nggak ya pasti muncul rasa nggak percaya. Soalnya keterbukaan itu jadi tanda kalau

pemerintah desa mau jujur dan nggak main-main sama uang rakyat. Kalau semuanya jelas, masyarakat juga merasa dilibatkan dan dihargai”

John Ferry selaku warga memberikan sedikit tambahan mengenai keterbukaan pengelolaan keuangan yaitu:

“Pernah waktu itu ada kegiatan desa yang katanya pakai dana desa, tapi nggak jelas laporannya. Ya kita jadi ngomel-ngomel juga. Soalnya kalau nggak ada laporan, kita nggak tahu apakah anggarannya beneran dipakai sesuai rencana atau nggak. Lama-lama masyarakat jadi curiga dan gampang tersulut emosi.”

Bapak Rudi Irwan juga turut berpendapat yaitu:

“Nggak akuntabel itu bikin masyarakat mikir pejabat desa main-main sama uang rakyat. Karena tanpa pertanggungjawaban yang jelas, masyarakat jadi merasa ada yang disembunyikan. Lama-lama muncul anggapan kalau pejabat desa nggak bisa dipercaya dan cuma mementingkan kepentingan sendiri”

Selanjutnya Bapak Fahrurazi menambahkan sedikit penjelasan mengenai kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan yaitu:

“Kadang pengurus desa cuma ngomong 'udah dianggarkan', tapi nggak ada bukti tertulis atau laporan, kita jadi curiga. Soalnya masyarakat butuh kejelasan, bukan sekadar omongan. Tanpa dokumen resmi atau laporan yang bisa dilihat bersama, warga merasa tidak dilibatkan dan mulai meragukan kejujuran pengurus desa”

Bapak Firdansyah berpendapat yaitu:

“Kita nggak tau mana yang udah dijalanin dan mana yang belum. Jadi kita bingung mau percaya gimana. Soalnya tanpa informasi yang jelas tentang pelaksanaan program, masyarakat nggak bisa menilai apakah dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai rencana atau tidak. Ketidakjelasan ini bikin warga merasa seperti penonton, bukan bagian dari pembangunan desa”

Mengenai kepercayaan dan administrasi Bapak Munawardi menambahkan sebagai berikut:

“Kalau laporan keuangan nggak pernah disampaikan, ya pasti masyarakat mikir ada yang disembunyikan. Soalnya tanpa laporan yang terbuka, masyarakat jadi bertanya-tanya dana itu dipakai untuk apa saja. Ketertutupan seperti ini gampang memicu prasangka buruk dan bisa bikin konflik antara warga dan aparat desa”

Bapak Mustiari Arizi sedikit menambahkan pendapatnya yaitu:

“Kepercayaan itu datang dari keterbukaan, kalau nggak terbuka ya kita jadi su'uzon terus. Soalnya kalau informasi soal anggaran dan kegiatan desa nggak dibuka ke publik, masyarakat merasa ditutupi. Akibatnya, muncul kecurigaan berlebihan dan suasana jadi nggak harmonis antara warga dan aparat desa”

3. Apa langkah yang disarankan untuk memperbaiki akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa? Berikut sedikit penjelasan yang disampaikan Bapak Fahillah yaitu:

“Menurut saya sih, harusnya tiap habis kegiatan atau proyek desa ada laporan tertulis dan diumumkan ke warga. Karena dengan begitu, masyarakat tahu dana digunakan untuk apa dan sejauh mana pelaksanaannya. Laporan

yang jelas bisa menghindari kecurigaan, memperkuat kepercayaan, dan bikin warga merasa dilibatkan dalam pembangunan desa”

Bapak Ansar menambahkan mengenai informasi dan keterbukaan sebagai berikut:

“Bisa bikin papan informasi di meunasah atau balai desa, jadi masyarakat tahu dana keluar masuk buat apa. Dengan cara ini, transparansi bisa dijaga karena semua orang bisa melihat langsung data anggaran dan realisasinya. Ini juga mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa”

Selanjutnya Bapak Safriadi menambahkan yaitu:

“Warga harus lebih dilibatkan, jangan cuma kepala desa dan perangkat aja yang tahu anggaran. Soalnya dana desa itu milik bersama, jadi pengelolaannya juga harus diketahui bersama. Kalau warga dilibatkan sejak perencanaan sampai evaluasi, kepercayaan bisa tumbuh, dan pengawasan dari masyarakat juga bisa berjalan dengan baik.”

Davied JP menambahkan sedikit pendapatnya mengenai kepercayaan terhadap masyarakat sebagai berikut:

“Lebih bagus lagi kalau ada audit rutin dari pihak luar, biar lebih netral. Soalnya kalau hanya internal yang periksa, masyarakat bisa ragu soal kejujurannya. Audit eksternal bisa jadi bentuk pengawasan independen yang bantu memastikan dana desa digunakan sesuai aturan dan hasilnya juga bisa jadi bukti pertanggungjawaban ke public”

Selanjutnya Bapak Facrul Rozi menambahkan mengenai transparansi terhadap partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Kalau bisa, laporan keuangan itu dipajang tiap bulan, jadi nggak nunggu akhir tahun. Dengan laporan rutin, masyarakat bisa langsung tahu perkembangan penggunaan dana desa secara berkala. Ini penting supaya tidak ada penumpukan informasi dan warga bisa ikut mengawasi sejak dini, bukan setelah semuanya selesai”

Bapak Isa menambahkan pendapatnya yaitu:

“Desa juga bisa manfaatin teknologi, kayak grup WA atau aplikasi buat ngasih info pengelolaan dana. Soalnya sekarang hampir semua orang punya HP, jadi informasi bisa cepat sampai ke masyarakat. Cara ini lebih praktis dan efisien, apalagi buat warga yang jarang datang ke balai desa, tetap bisa ikut memantau dan tahu perkembangan dana desa”

Selanjutnya Ibu Fani sedikit menambahkan pendapatnya yaitu:

“Harus ada musyawarah rutin soal keuangan, jadi warga bisa tanya langsung kalau ada yang nggak jelas. Musyawarah ini jadi kesempatan buat warga menyampaikan pendapat dan pertanyaan seputar penggunaan dana desa. Dengan cara ini, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat jadi lebih terbuka, dan masyarakat merasa lebih dihargai karena punya suara dalam pengelolaan keuangan desa.”

Bapak Ferry menambahkan mengenai pelatihan perangkat desa sebagai berikut:

“Perangkat desa harus dikasih pelatihan juga tentang pentingnya transparansi dan laporan keuangan. Karena tanpa pemahaman yang jelas, mereka bisa kesulitan dalam menyusun laporan yang akurat dan menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Pelatihan ini penting agar pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau kesalahpahaman di antara warga.”

Bapak Sofyan menambahkan sedikit mengenai partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Kalau bisa dibikin tim pengawasan dari warga sendiri, yang dipilih secara netral. Dengan melibatkan warga langsung dalam pengawasan, bisa tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap dana desa. Pemilihan tim secara netral juga memastikan bahwa pengawasan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi, sehingga lebih objektif dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.”

Selanjutnya Bapak Amirul selaku warga memberi pendapat mengenai pelaporan dan sanksi sebagai berikut:

“Harus ada sanksi tegas juga kalau ada penyimpangan, biar ada efek jera. Sanksi yang jelas dan diterapkan secara konsisten bisa menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aturan. Ini juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena mereka tahu bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan setiap tindakan yang merugikan masyarakat akan ditindaklanjuti.”

4.3.3 Peran Masyarakat

1. Apa fungsi utama aparaturnya desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Gampong Lampoh Daya? Bapak Awan berpendapat yaitu:

“Ya tugasnya ya jadi penghubung antara masyarakat sama pemerintah, biar suara kami didengar juga. Perangkat desa atau perwakilan warga harus bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan dari masyarakat ke pemerintah desa secara terbuka. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih mewakili kebutuhan warga, bukan cuma dari atas saja. Ini penting untuk membangun kepercayaan dua arah dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif.”

Selanjutnya Ibu Irma menambahkan yaitu:

“Tugas mereka itu sebenarnya jadi jembatan antara warga sama pemerintah desa, biar apa yang kita rasain atau pengen sampaikan bisa nyampe. Jadi nggak cuma dari atas aja yang ngomong, tapi suara warga juga didengar. Kalau kayak gitu kan enak, kita merasa dilibatkan, nggak cuma nonton doang.”

Bapak Hamdani selaku warga juga menambahkan mengenai partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Harusnya mereka tuh ngatur jalannya musyawarah, jangan cuma hadir doang, tapi aktif nanya dan ngajak warga ngomong. Jadi bukan cuma formalitas kumpul-kumpul aja, tapi benar-benar diskusi yang ngedengerin pendapat warga. Kalau kayak gitu, masyarakat juga semangat ikut, karena merasa pendapatnya dihargai dan bisa kasih masukan buat kemajuan desa.”

Bapak Fauzan juga memberikan pendapatnya yaitu:

“Mereka itu seharusnya yang ngatur jalannya musyawarah, bukan cuma duduk manis. Harusnya mereka aktif ngajak warga ngobrol, nanya pendapat, biar musyawarahnya hidup. Kalau mereka aktif, warga juga jadi berani ngomong dan nggak segan nyampaikan unek-unek. Jadi musyawarahnya bukan cuma formalitas, tapi beneran ada gunanya.

Selaku warga gampong Bapak Zakir memberikan pendapatnya mengenai pemahaman antar pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

“Mereka harus jadi pemimpin diskusi, yang bisa arahkan warga biar paham apa yang direncanakan. Jadi bukan cuma bacain rencana atau data, tapi dijelaskan dengan bahasa yang gampang dimengerti. Kalau warga paham, mereka bisa kasih masukan yang lebih tepat dan merasa dilibatkan dalam setiap keputusan yang diambil desa”

Ibu Yani juga memberikan pendapat yang sama yaitu:

“Mereka itu harusnya jadi yang nuntun jalannya diskusi, bukan cuma nyampein info doang. Harus bisa ngejelasin rencana-rencana desa dengan cara yang gampang dimengerti warga. Jadi warga nggak bingung dan bisa ikut mikir bareng, kasih ide, atau nanya kalau ada yang nggak jelas. Kalau kayak gitu kan enak, semua bisa saling ngerti dan merasa ikut punya andil”

Selanjutnya Bapak Ibnu Khaldun berpendapat sebagai berikut:

“Sebagai pengambil keputusan awal, mereka tuh harus tahu dulu masalah warga, baru diomongin di musyawarah. Jadi jangan asal bawa rencana sendiri tanpa dengerin dulu keluhan atau kebutuhan masyarakat. Kalau mereka ngerti dulu kondisi di lapangan, musyawarah jadi lebih tepat sasaran dan nggak asal putuskan sesuatu yang jauh dari realita”

Bapak Heri juga turut memberikan pendapatnya mengenai musyawarah pemabngunan dalam aparaturnya desa yaitu:

“Harusnya mereka ngajak semua elemen masyarakat, jangan pilih-pilih. Jangan cuma yang dekat sama aparat desa aja yang diajak musyawarah, tapi juga ibu-ibu, pemuda, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Soalnya kalau semua diajak, suara yang muncul lebih beragam dan keputusan yang diambil bisa lebih adil dan nyentuh ke semua lapisan”

Selanjutnya Bapak Azwir juga berpendapat yaitu:

“Mereka tuh harusnya ngajak semua golongan warga, jangan milih-milih. Kadang yang diajak cuma orang-orang tertentu aja, padahal banyak juga warga lain yang pengen ikut nyumbang ide. Kalau semua dilibatkan, keputusan desa jadi lebih adil dan sesuai kebutuhan banyak orang, bukan cuma segelintir orang aja.”

Bu tatiek selaku warga memberikan masukannya sebagai berikut:

“Fungsi utamanya ya menampung semua usulan dari warga, bukan ngatur sendiri. Jadi perangkat desa itu tugasnya dengerin dulu apa yang dibutuhkan masyarakat, baru dirapatin bareng. Kalau mereka jalan sendiri tanpa dengerin warga, ya akhirnya program-programnya nggak nyambung sama kebutuhan yang ada di lapangan.”

Ibu Yanti berpendapat yaitu:

“Fungsi utamanya sih jadi penampung semua usulan dari warga, bukan ngatur semuanya sendiri. Jadi tugas perangkat desa itu bukan cuma bikin keputusan tanpa nanya dulu ke warga, tapi lebih ke dengerin apa yang mereka butuhin, terus disusun bareng-bareng. Kalau mereka cuma jalanin rencana mereka sendiri, bisa jadi yang diusulkan nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan warga.”

Selanjutnya Bapak Gilang juga memberikan masukannya yaitu:

“Jadi penengah lah, biar usulan dari warga sama rencana pemerintah nyambung. Mereka itu harus bisa menjembatani apa yang diinginkan warga dengan apa yang bisa dilaksanakan pemerintah desa. Kalau nggak ada penyeimbang, bisa jadi usulan warga nggak diterima atau rencana pemerintah jadi nggak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.”

Bapak Fadli berpendapat yaitu:

“Jadi mereka harus bisa jadi penengah, biar usulan warga sama rencana pemerintah bisa selaras. Tugas mereka itu ngehubungin kepentingan warga dengan apa yang bisa direalisasikan pemerintah desa. Kalau nggak ada yang jadi jembatan, bisa jadi rencana yang ada nggak sesuai dengan harapan warga atau malah susah dijalanin karena nggak dipertimbangkan dengan matang.”

Bapak Syahril juga memberikan masukannya yaitu:

“Mereka harus aktif ngajak warga diskusi, bukan malah diem aja nunggu orang ngomong. Kalau cuma nunggu, bisa jadi yang ngomong cuma itu-itu aja, padahal banyak ide atau masalah yang belum diungkap. Dengan aktif ngajak diskusi, semua warga bisa merasa dilibatkan, dan kita jadi bisa dapet perspektif yang lebih luas sebelum ambil keputusan.”

Selanjutnya Bapak Afrizal berpendapat mengenai peran masyarakat dalam diskusi dengan aparaturnya desa sebagai berikut:

“Mereka harus aktif ngajak warga diskusi, jangan cuma diem aja nunggu orang ngomong. Kalau cuma nunggu, bisa jadi yang berbicara cuma segelintir orang aja. Tapi kalau mereka aktif ngajak, semua warga bisa ikut berbicara dan nyampein pendapatnya. Ini penting biar keputusan yang diambil bisa mewakili suara banyak orang, bukan cuma yang berani ngomong aja.”

Bapak Agus juga berpendapat yaitu:

“Mereka tuh yang harus fasilitasi, jadi kita bisa tahu anggaran dan rencana buat apa aja. Tugas mereka bukan cuma nyiapin anggaran, tapi juga ngejelasin ke warga tentang rencana penggunaan dana dan proyek yang bakal dijalankan. Kalau nggak ada penjelasan yang jelas, kita sebagai warga bisa bingung dan curiga soal penggunaan dana desa.”

Muhammad Alfin memberi masukan mengenai musyawarah pembangunan sebagai berikut:

“Biar pembangunan pas sasaran, ya aparaturnya desa harus dengerin masyarakat dulu waktu musyawarah. Soalnya yang paling tahu kebutuhan di lapangan ya warga sendiri. Kalau masukan warga nggak didengerin, bisa-bisa program yang dijalankan malah nggak sesuai, dan akhirnya nggak bermanfaat maksimal. Musyawarah itu tempatnya cari jalan tengah, bukan cuma tempat dengerin laporan dari atas”

Bapak Sardani berpendapat yaitu:

“Supaya pembangunan tepat sasaran, ya perangkat desa harus mau dengerin dulu apa kata warga pas musyawarah. Soalnya yang ngerasain langsung kebutuhan itu kan kita-kita. Kalau cuma jalanin rencana tanpa denger suara warga, bisa aja hasilnya nggak nyambung sama kenyataan di lapangan. Makanya penting banget ngobrol bareng dulu sebelum ambil keputusan”

2. Apa konsekuensi dari minimnya keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan ditingkat desa? Selanjutnya adalah hasil wawancara dari Bapak Ibnu Khaldun yaitu:

“Ya jadinya pembangunan nggak sesuai kebutuhan warga, mubazir. Misalnya, dibangun fasilitas yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin, sementara kebutuhan utama warga malah nggak terpenuhi. Ini terjadi karena keputusan diambil tanpa ngedengerin suara warga dulu. Akhirnya, dana desa habis buat proyek yang nggak dipakai atau nggak bermanfaat maksimal”

Selanjutnya dari Heri berpendapat mengenai musyawarah sebagai berikut:

“Jadinya pembangunan malah nggak sesuai kebutuhan warga, cuma buang-buang anggaran. Misalnya, bikin proyek yang sebenarnya nggak penting buat warga, sementara hal yang lebih dibutuhin malah nggak ada. Ini semua karena keputusan diambil tanpa dengerin pendapat warga dulu. Ujung-ujungnya, hasilnya nggak kepake dan cuma jadi pajangan”

Bapak Azwir juga berpendapat yaitu:

“Kadang jadi bangun sesuatu yang nggak dipakai, karena warga nggak pernah ditanya. Misalnya, dibangun taman atau fasilitas olahraga, tapi warga lebih butuh jalan bagus atau bantuan modal usaha. Ini terjadi karena keputusan diambil tanpa musyawarah yang benar-benar dengerin suara warga. Akhirnya, proyek yang dibangun cuma jadi pajangan, nggak ada manfaatnya buat masyarakat”

Selanjutnya Bapak Gilang memberikan pendapatnya mengenai kepentingan keterlibatan masyarakat yaitu:

“Kadang malah jadi bangun sesuatu yang nggak kepace, soalnya warga nggak pernah diajak ngomong. Contohnya bikin taman atau bangunan yang jarang dipakai, padahal warga lebih butuh jalan bagus atau air bersih. Ini karena keputusan cuma dari atas aja, tanpa dengerin kebutuhan nyata warga. Ujung-ujungnya, anggaran habis buat hal yang nggak bermanfaat”

Mengenai keterlibatan masyarakat dengan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dalam pembangunan, Bapak Fadli berpendapat yaitu:

“Nanti warga malah nyalahin pemerintah terus karena nggak pernah dilibatkan. Soalnya mereka merasa keputusan diambil sepihak tanpa dengerin kebutuhan atau pendapat mereka. Akhirnya, kalau ada masalah atau pembangunan yang nggak sesuai, warga gampang curiga dan marah. Kepercayaan jadi hilang, padahal seharusnya pemerintah dan warga bisa kerja sama”

Bapak Syauqi memberikan pendapat yang sama yaitu:

“Kalau warga nggak pernah diajak ikut musyawarah, ya wajar aja kalau nanti mereka nyalahin pemerintah terus. Mereka ngerasa nggak dianggap,

jadinya gampang curiga. Apalagi kalau ada pembangunan yang nggak sesuai kebutuhan, pasti warga mikirnya pemerintah nggak peduli atau main sendiri. Padahal, kalau dari awal diajak diskusi, semua bisa paham dan lebih bisa nerima hasilnya”

Selanjutnya Bapak Afrizal memberikan pendapatnya yaitu:

“Akhirnya muncul ketidakpercayaan sama aparatur desa, kayak ada jarak gitu. Warga jadi mikir aparatur desa cuma jalanin urusan mereka sendiri tanpa mikirin masyarakat. Setiap keputusan yang diambil terasa asing, dan warga merasa nggak punya kendali atau pengaruh. Padahal, kalau ada komunikasi yang baik dan keterbukaan, warga bakal lebih percaya dan merasa jadi bagian dari pembangunan”

Bapak Aguseno berpendapat yaitu:

“Akhirnya warga jadi nggak percaya sama aparatur desa, kayak ada jarak gitu. Warga ngerasa kayak cuma jadi penonton, nggak diajak ngobrol atau dilibatkan. Setiap ada keputusan, kesannya cuma dari atas aja, jadi warga curiga dan nggak punya rasa kepemilikan. Padahal kalau dari awal diajak diskusi, pasti warga lebih percaya dan mau ikut bantu”

Muhammad Alfin Aris juga turut memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Hasil pembangunan bisa aja nggak dimanfaatkan maksimal karena warga nggak merasa punya. Soalnya dari awal mereka nggak diajak ngomong atau dilibatkan dalam perencanaannya. Akhirnya, fasilitas yang dibangun cuma jadi pajangan, nggak dirawat, atau malah dibiarkan rusak. Padahal kalau warga dilibatkan, mereka bakal lebih peduli dan ngerasa bertanggung jawab buat jaga dan manfaatin hasil pembangunan itu”

Selanjutnya Bapak Surdani mengenai keterlibatan masyarakat yaitu:

“Hasil pembangunan bisa aja nggak dimanfaatkan maksimal karena warga nggak merasa punya. Soalnya dari awal mereka nggak diajak ngomong atau dilibatkan dalam perencanaannya. Akhirnya, fasilitas yang dibangun cuma jadi pajangan, nggak dirawat, atau malah dibiarkan rusak. Padahal kalau warga dilibatkan, mereka bakal lebih peduli dan ngerasa bertanggung jawab buat jaga dan manfaatin hasil pembangunan itu”

Bapak Wahyu Supriono berpendapat yaitu:

“Pembangunan bisa aja jadi sia-sia karena warga nggak merasa punya. Soalnya dari awal mereka nggak diajak ngomong atau kasih masukan. Akhirnya, fasilitas yang dibangun cuma jadi pajangan, nggak dipakai atau dirawat. Padahal kalau warga diajak terlibat, mereka pasti lebih peduli dan ngerasa bertanggung jawab buat manfaatin dan ngejaga hasilnya”

Selanjutnya Bapak Feri memberikan pendapatnya yaitu:

“Bisa jadi programnya gagal, karena dari awal nggak ada partisipasi warga. Soalnya, program yang direncanain tanpa dengerin pendapat atau kebutuhan masyarakat biasanya nggak sesuai sama kenyataan di lapangan. Warga jadi nggak ngerti manfaatnya, nggak antusias, bahkan nggak peduli. Akhirnya program yang harusnya membantu malah nggak jalan atau cuma jadi formalitas”

Bapak Mucriansyah mengenai partisipasi masyarakat yaitu:

“Programnya bisa aja gagal, soalnya dari awal warga nggak diajak ikut. Jadi mereka nggak ngerti tujuannya, nggak merasa butuh, dan akhirnya nggak peduli. Ujung-ujungnya program cuma jalan di atas kertas, tapi nggak ada dampak nyata di lapangan. Padahal kalau warga dilibatkan dari awal, mereka pasti lebih semangat buat ikut dan manfaatin program itu”

Selanjutnya Ibu Suraida berpendapat yaitu:

“Warga jadi malas dukung, karena mereka pikir itu bukan hasil musyawarah bareng. Mereka ngerasa program cuma keputusan sepihak dari perangkat desa, bukan sesuatu yang mereka sepakati bersama. Akhirnya, warga nggak antusias ikut, nggak peduli buat bantu, dan bahkan ada yang malah ngerasa program itu nggak penting. Padahal kalau dari awal dibahas bareng, warga pasti lebih semangat mendukung”

Bapak Muda Wali memberikan pendapatnya yaitu:

“Warga jadi malas dukung, soalnya mereka ngerasa itu bukan hasil musyawarah bareng. Buat mereka, program itu kayak keputusan sepihak dari pemerintah desa, jadi mereka nggak merasa punya tanggung jawab buat ikut bantu. Malah ada yang mikir program itu nggak penting atau nggak sesuai kebutuhan. Padahal kalau dari awal dibahas bareng, warga pasti lebih semangat buat dukung dan ikut jalanin”

Bapak Fakri juga turut memberikan pendapatnya mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai berikut:

“Muncul konflik juga bisa, karena ada yang merasa nggak adil. Soalnya, kalau keputusan diambil tanpa musyawarah atau cuma didengar dari sebagian orang, warga lain bisa ngerasa nggak dianggap. Mereka mikir ada

yang diutamakan, sementara kebutuhan mereka diabaikan. Ujung-ujungnya jadi saling curiga, ngomongin di belakang, bahkan bisa ribut. Padahal, kalau dari awal dibicarakan bareng, semua bisa paham dan terima hasilnya”

Selanjutnya Bapak Wahyudi memberikan pendapatnya:

“Kalau nggak melibatkan warga, ya nggak akan ada rasa tanggung jawab juga. Soalnya mereka ngerasa itu bukan hasil keputusan mereka, cuma program dari pemerintah desa aja. Akhirnya, pas ada fasilitas baru atau proyek desa, warga jadi cuek, nggak peduli mau dirawat atau dipakai. Padahal kalau dari awal mereka dilibatkan, mereka pasti lebih peduli, merasa punya, dan ikut jaga hasilnya”

Bapak Helmi berpendapat yaitu:

“Kalau warga nggak dilibatkan, ya jangan harap mereka punya rasa tanggung jawab. Buat mereka, itu cuma proyek pemerintah desa, bukan sesuatu yang mereka butuhin atau pengenin. Jadi kalau rusak atau nggak dirawat, mereka juga nggak peduli. Padahal kalau dari awal diajak ngobrol dan sepakat bareng, warga pasti lebih merasa punya dan mau ikut jaga”

Selanjutnya Ibu Intan juga memberikan pendapatnya yaitu:

“Kalau warga nggak diajak terlibat, ya jangan heran kalau mereka nggak punya rasa tanggung jawab. Mereka ngerasa itu bukan urusan mereka, cuma program pemerintah desa aja. Jadi kalau fasilitasnya rusak atau nggak terpakai, ya mereka cuek. Padahal kalau dari awal dilibatkan, mereka pasti lebih peduli, merasa punya, dan mau ikut jaga”

Bapak Helmi berpendapat mengenai musyawarah atas keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Kalau warga nggak dilibatkan, ya jelas mereka nggak bakal punya rasa tanggung jawab. Mereka nggak ngerasa itu proyek mereka, cuma dari pemerintah desa aja. Jadi kalau ada yang rusak atau nggak kepace, mereka ya nggak peduli. Tapi kalau sejak awal diajak ngomong dan diberi kesempatan buat nyumbangin ide, mereka bakal lebih merasa punya dan lebih semangat buat merawat”

3. Bagaimana langkah aparat desa dalam memotivasi masyarakat agar terlibat dalam musyawarah pembangunan? Bapak Ade Irawan memberi pendapatnya mengenai pertanyaan diatas sebagai berikut:

“Mereka harus sering-sering kasih info, jangan dadakan baru bilang ada musyawarah. Soalnya, kalau pengumuman musyawarah tiba-tiba, warga jadi nggak siap, bahkan bisa aja mereka nggak datang karena nggak tahu sebelumnya. Kalau infonya sering disebar, warga bisa lebih siap dan merasa dihargai karena diajak partisipasi sejak awal”

Selanjutnya Bapak Hendra selaku warga gampong turut memberikan pendapatnya yaitu:

“Mereka harus sering-sering kasih info, jangan dadakan baru bilang ada musyawarah. Kalau pengumumannya mendadak, warga bisa aja nggak tahu atau nggak sempat datang. Kalau dari awal udah dikasih tahu dan diingatkan, warga bakal lebih siap dan lebih tertarik buat ikut, jadi nggak cuma sekedar formalitas”

Bapak Ulil Azmi berpendapat yaitu:

“Kalau bisa dikasih tahu dari awal, dijelasin juga manfaat ikut musyawarah itu apa. Soalnya, kalau warga nggak tahu kenapa mereka harus ikut, mereka bakal mikir nggak ada gunanya. Tapi kalau dijelaskan kenapa penting buat hadir, kayak bisa menyampaikan pendapat atau ngasih masukan untuk pembangunan, pasti warga lebih tertarik dan merasa dihargai”

Bapak syahrijuan memberikan pendapatnya mengenai musyawarah atas keterlibatan masyarakat yaitu:

“Bisa juga lewat media sosial gampong, atau bikin pengumuman yang jelas. Soalnya, sekarang banyak orang yang lebih sering cek media sosial, jadi informasi lewat sana bisa lebih cepat sampai. Kalau ada pengumuman yang jelas, baik di media sosial atau tempat umum, warga jadi lebih mudah tahu kapan dan di mana musyawarah, jadi mereka bisa siap-siap ikut”

Bapak Edi Syaputra turut memberikan pendapatnya yaitu:

“Bisa juga pakai media sosial gampong, atau pasang pengumuman yang jelas di tempat-tempat strategis. Soalnya, nggak semua warga selalu ada di balai desa buat denger info. Kalau ada info di grup WhatsApp gampong atau papan pengumuman di meunasah, warga jadi lebih gampang tahu kapan ada musyawarah dan bisa siap-siap ikut”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan.
2. Sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang menyebabkan potensi terjadinya kesalahan dalam perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan.
3. Keterbatasan pemahaman aparatur desa terkait penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi salah satu kendala utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan masih rendah, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa kurang optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa melalui pelatihan rutin terkait pengelolaan keuangan, khususnya penggunaan aplikasi Siskeudes.
2. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dengan menyediakan informasi anggaran dan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.
3. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui forum musyawarah desa.
4. Penguatan pengawasan internal melalui peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Menggunakan sistem pencatatan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Angriani, D., Ramadhani, N., Afrizal, R., & Marta, I. (2023). *Akuntabilitas Aparatur Gampong Ujong Drien Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Tahun 2023*. 3, 117–128.
- Arviyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i1.338>
- Asoka, R. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 84–100. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>
- Balakrishnan, S., & Forsyth, A. (2019). Qualitative methods. In *The Routledge Handbook of International Planning Education*. <https://doi.org/10.4324/9781315661063-13>
- Büyük, A., Farkı, Y., Kardeşler, O., Uzun, A., İletişimde, M., Yarosh, S., Üniversitesi, M., 704, Y. 1, Profile Bakin, A., & Bakin, P. (2023). *Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents. Visit www.DeepL.com/pro for more information*. 40(Bagan 2), 11–20. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580720>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Diyati, H., & Muhyadi, M. (2014). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di Sdn Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28–43. <https://doi.org/10.21831/amp.v2i1.2407>
- Eryana. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Iqtishaduna Journal*, Juni(2), 89–95.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>

- Garrison, R. H., Noreen, E., & Peter C. Brewer, P. (2017). *Managerial Accounting*. McGraw-Hill Education.
<https://books.google.co.id/books?id=Yn3jnAAACAAJ>
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- Hasan, S., Kasim, N. M., & Margareth Tijow, L. (2020). Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat. *Borneo Law Review*, 4(2), 101–122.
<https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2.1713>
- Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (1992). *Accounting Theory*. Irwin.
<https://books.google.co.id/books?id=kJ5ZAAAAAYAAJ>
- Mahyudin, M., Mihzan, L. M. F., Asrin, A., & Nurlinda, N. (2022). Sumber Daya Manusia Pemrintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 82–88.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2444>
- Makaminang, N. E., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 325–334.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. In *Andi*. Andi Offset.
<https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84.
<http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Nurjaya, Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh

- Kompetensi SDM Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4(3), 346. <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Kompetensi-Sumber-Daya-Manusia-Dan-Kinerja-Nurjaya-Affandi/c7e9958246097d200e181857c663a9e5da31aef4>
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- permata intan nur, fauzan ahmad, sampang muafi. (2023). “Бсп За България” Е Под Номер 1 В Бюлетината За Вота, Герб - С Номер 2, Пп-Дб - С Номер 12. *Peran Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah*, 2(3), 310–324. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>
- Rachman, R. (2018). Penerapan Metode Moving Average Dan Exponential Smoothing Pada Peramalan Produksi Industri Garment. *Jurnal Informatika*, 5(2), 211–220. <https://doi.org/10.31311/ji.v5i2.3309>
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Sari, R., Dwitayanti, Y., Maharani, C., Yonnedi, E., Analisis, P., Manajemen, I., Perusahaan, R., Lanjut, T., Nusron, L. A., Pangesti, H., Putri, A. Z., Ratnawati, J., Sumaryati, A., Mardjono, E. S., Oktafiyani, M., Halim, A., Intelektual, M., Accounting, G., Winarni, D., ... Sundari, A. (2023). *Jurnal Akuntansi*. 13(3).
- Stoner, J. A. F., & Greenwood, R. G. (1982). *Management: Study Guide and Workbook*. Prentice-Hall. https://books.google.co.id/books?id=PUSWR_PLtm0C
- Sulistiyowati, W. (2017). Buku Ajar Statistika Dasar. *Buku Ajar Statistika Dasar*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Sunaryadi, T., Ilmiah, H. Y.-K. J., & 2021, undefined. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Journal.Stekom.Ac.Id*, 14(1), 154–159. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/386>

- Suwarno, S., Lustrilanang, P., & Sunardi, S. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 177–186. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1718>
- Triandani, S., April, M., Alkadafi, M., & Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, F. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76–91.
- Widianti, S. T. W. (2018). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga*, 1–7.
- Zainal, Z. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada ...)*, 1, 170–176.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI GAMpong LAMPOH
DAYA KOTA BANDA ACEH

1. SDM Pengelola Keuangan

Menurut Nursin et al., (2022) ada tiga pertanyaan yang bias menjadi acuan dalam SDM Pengelola Keuangan:

- a. Apa faktor utama yang memicu terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan gampong?
- b. Bagaimana keterkaitan antara pelatihan aparatur desa dengan peningkatan efektifitas dalam pengelolaan keuangan?
- c. Bagaimana kualitas SDM mempengaruhi pengelolaan keuangan gampong

2. Sistem Pengelolaan Keuangan

Menurut Angriani et al., (2023) ada tiga pertanyaan yang bias menjadi acuan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan:

- a. Apa konsekuensi social dari kurangnya transparasi informasi keuangan desa masyarakat?
- b. Bagaimana pengaruh kurangnya akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat?
- c. Apa langkah yang disarankan untuk memperbaiki akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?

3. Peran Masyarakat

Menurut Mustanir et al., (2018) ada tiga pertanyaan yang bias menjadi acuan dalam Peran Masyarakat:

- a. Apa fungsi utama aparatur desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan di gampong lampoh daya?
- b. Apa konsekuensi dari minimnya keterlibatan masyarakat terhadap hasil pembangunan ditingkat desa?
- c. Bagaimana langkah aparatur desa dalam memotivasi masyarakat agar terlihat dalam musyawarah pembangunan?

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN







